

**PERKEMBANGAN  
EKONOMI KEUANGAN DAERAH**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**Triwulan I - 2007**

**Kantor Bank Indonesia  
Banda Aceh**

**Visi Bank Indonesia :**

“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”.

**Misi Bank Indonesia :**

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan”.

**Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia :**

“Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku yang terdiri atas Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas dan Kebersamaan”.

**Visi Kantor Bank Indonesia Banda Aceh :**

“Mewujudkan Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan perannya sebagai economic intelligence dan unit penelitian”.

**Misi Kantor Bank Indonesia Banda Aceh :**

“Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem pembayaran secara efektif dan efisien serta peningkatan kajian ekonomi regional serta melakukan koordinasi dengan *stake holders* terutama dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait”.

**Kalender Publikasi :**

Triwulan I	Mei
Triwulan II	Agustus
Triwulan III	November
Triwulan IV	Februari

---

**Penerbit :**

Seksi Statistik Kajian Ekonomi dan Moneter  
Bidang Ekonomi, Moneter dan Perbankan  
Kantor Bank Indonesia Banda Aceh  
Jl. Jendral Sudirman No.82  
Banda Aceh, Indonesia  
Telp : 0651-42981 / Fax : 0651-45247  
Homepage : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)  
Email : [eko\\_hj@bi.go.id](mailto:eko_hj@bi.go.id)

---

Halaman ini sengaja dikosongkan.  
*This page is intentionally blank*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya, Kajian Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Triwulan I-2007 dapat kami selesaikan. Kajian ini terdiri atas beberapa topik, yaitu: (1) Perkembangan Makro Ekonomi, (2) Perkembangan Inflasi, (3) Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran, dan (4) Prospek Perekonomian. Selain itu, juga kami tambahkan kajian singkat mengenai isu ekonomi yang aktual terjadi.

Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah untuk memberikan informasi ekonomi, keuangan, perbankan kepada *stakeholders* yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian, pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi NAD.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga kajian ini terselesaikan. Masukan terutama penyediaan data terkini, saran ataupun kritik yang membangun sangat lah kami harapkan untuk meningkatkan kualitas kajian ini dimasa mendatang.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan ridho-Nya dan selalu memberikan kemudahan kepada kita dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.

Banda Aceh, Mei 2007  
BANK INDONESIA BANDA ACEH

**N A W A W I**  
Pemimpin

Halaman ini sengaja dikosongkan.  
*This page is intentionally blank*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
BAB I PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI.....	1
A. Tinjauan Umum .....	1
B. Pertumbuhan Ekonomi .....	1
C. Struktur Perekonomian .....	3
D. Investasi .....	4
E. Ekspor Impor .....	5
<b>Boks 1 : Pengembangan Kawasan Sabang</b>	
<b>Boks 2 : Dampak Banjir Bandang Aceh Tamiang</b>	
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI	
A. Tinjauan Umum .....	7
B. Inflasi Nanggroe Aceh Darussalam .....	8
C. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa .....	9
D. Inflasi Kota Banda Aceh .....	15
E. Inflasi Kota Lhokseumawe .....	16
<b>Boks 3 : Sumber Tekanan Inflasi NAD Triwulan I-2007 (Komoditi Beras)</b>	
BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN	
A. Bank Umum .....	17
1. Perkembangan Jaringan Kantor .....	18
2. Perkembangan Aset Bank Umum .....	18
3. Perkembangan DPK Bank Umum .....	18
4. Perkembangan Kredit Bank Umum .....	20
5. Perkembangan Kredit MKM Bank Umum .....	22
6. Intermediasi Bank Umum .....	22
7. Kualitas Kredit Bank Umum .....	23
B. Bank Perkreditan Rakyat .....	23
C. Sistem Pembayaran .....	24
<b>Boks 4 : Kredit Bermasalah BPR NAD</b>	
<b>Boks 5 : Round-Up Harga di Kabupaten Pidie</b>	
BAB IV PROSPEK PEREKONOMIAN.....	25

## DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Pertumbuhan Sektoral NAD .....	1
Tabel	1.2	Perkiraan Pertumbuhan Sektoral Trw I-2007 .....	2
Tabel	1.3	Pertumbuhan PDRB menurut Penggunaan .....	3
Tabel	1.4	Kontribusi Sektoral NAD .....	3
Tabel	1.5	Kontribusi Sektoral NAD Triwulan I-2007 .....	4
Tabel	1.6	Kontribusi PDRB (dengan migas) Menurut Penggunaan .....	4
Tabel	1.7	Trend Ekspor Impor NAD menurut Klasifikasi SITC .....	5
Tabel	2.1	Inflasi NAD menurut Kelompok Barang dan Jasa .....	9
Tabel	2.2	Komoditas dengan Laju dan Andil Inflasi Triwulanan Terbesar di NAD .....	10
Tabel	3.1	Jumlah Bank dan Kantor Bank di NAD Triwulan I-2007 .....	18
Tabel	3.2	Indikator Pokok BPR/S NAD.....	23

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1 Ekspor-Import Non Migas NAD.....	5
Grafik	2.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan di NAD dan Nasional .....	8
Grafik	2.2 Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) di NAD dan Nasional.....	8
Grafik	2.3 Besaran dan Andil Inflasi Inti, Administered Price, dan Volatile Food di NAD Triwulan I-2007.....	8
Grafik	2.4 Perkembangan Inflasi Inti, Administered Price, dan Volatile Food .....	9
Grafik	2.5 Inflasi NAD menurut Kelompok Barang dan Jasa Tw.I-2007.....	10
Grafik	2.6 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di NAD11	
Grafik	2.7 Inflasi Kelompok Bahan Makanan Menurut Sub-Kelompok Tw.I-2007.....	11
Grafik	2.8 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Makanan Jadi di NAD.....	12
Grafik	2.9 Inflasi Kelompok Makanan Jadi Menurut Sub-Kelompok Tw.I-2007.....	12
Grafik	2.10 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar di NAD.....	12
Grafik	2.11 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Menurut Sub-Kelompok Tw.I-2007.....	13
Grafik	2.12 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Sandang di NAD 13	
Grafik	2.13 Inflasi Kelompok Sandang Menurut Sub-Kelompok Tw.I-2007.....	13
Grafik	2.14 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Kesehatan di NAD.....	14
Grafik	2.15 Inflasi Kelompok Kesehatan Menurut Sub-Kelompok Tw.I-2007.....	14
Grafik	2.16 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga di NAD.....	14
Grafik	2.17 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Menurut Sub-Kelompok Tw.I-200714	
Grafik	2.18 Trend Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di NAD.....	15
Grafik	2.19 Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Menurut Sub-Kelompok Tw.I-200715	
Grafik	2.20 Inflasi Triwulanan (qtq) Banda Aceh .....	15

Grafik	2.21 Besaran dan Andil Inflasi Inti, Administered Prices dan Volatile Food di Kota Banda Aceh Triwulan I-2007.....	15
Grafik	2.22 Inflasi Banda Aceh menurut Kelompok Barang dan Jasa.....	16
Grafik	2.23 Inflasi Triwulanan (qtq) Lhokseumawe .....	16
Grafik	2.24 Besaran dan Andil Inflasi Inti, Administered Prices dan Volatile Food di Kota Lhokseumawe Triwulan I-2007.....	16
Grafik	2.25 Inflasi Lhokseumawe menurut Kelompok Barang dan Jasa.....	16
Grafik	3.1 Perkembangan Total Aset Bank Umum di NAD .....	18
Grafik	3.2 Perkembangan DPK Bank Umum di NAD .....	19
Grafik	3.3 Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di NAD .....	19
Grafik	3.4 Perkembangan DPK Bank Umum Syariah di NAD .....	19
Grafik	3.5 Pangsa DPK Bank Umum Konvensional menurut di NAD .....	19
Grafik	3.6 Perkembangan Kredit/Pembiayaan Bank Umum di NAD .....	20
Grafik	3.7 Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional menurut Penggunaan di NAD .....	20
Grafik	3.8 Perkembangan Kredit Bank Umum Konvensional menurut Sektor Ekonomi Dominan di NAD .....	20
Grafik	3.9 Perkembangan Kredit Bank Umum Syariah menurut Penggunaan di NAD .....	21
Grafik	3.10 Perkembangan Kredit Bank Umum Syariah menurut Sektor Ekonomi Dominan di NAD .....	21
Grafik	3.11 Perkembangan Kredit MKM Bank Umum di NAD .....	22
Grafik	3.12 Perkembangan LDR/FDR Bank Umum di NAD .....	22
Grafik	3.13 Perkembangan Rasio NPL/NPL Bank Umum di NAD .....	23
Grafik	3.14 Perkembangan Peredaran Uang Tunai di KBI Banda Aceh .....	24
Grafik	3.15 Perkembangan Perputaran Kliring melalui KBI Banda Aceh .....	24
Grafik	3.16 Perkembangan Uang Palsu yang ditemukan KBI Banda Aceh .....	24



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

### **PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN NAD TRIWULAN I-2007**

#### **PERKEMBANGAN EKONOMI**

Pada Triwulan I-2007, perekonomian NAD diperkirakan mengalami penurunan sebesar *minus* 3,44% (qtq) dibandingkan triwulan IV-2006, terutama disebabkan penurunan output sektor bangunan. Meskipun demikian, secara tahunan perekonomian NAD tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 2,40% dibandingkan tahun 2005 sehingga nominal PDRB NAD 2006 Atas Dasar Harga Konstan tercatat sebesar Rp37,16 triliun. Pertumbuhan ini terutama didorong sektor bangunan yang tumbuh sebesar 48,41%.

Struktur perekonomian NAD pada triwulan I-2007 mengalami pergeseran dimana sektor pertanian mendominasi sebesar 27,37% terhadap total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang sebesar Rp73,54 triliun. Pada tahun 2006 sebelumnya, perekonomian NAD paling besar disumbang oleh sektor migas. Seiring dengan terus menurunnya produksi migas, maka sumbangan dalam pembentukan PDRB masih cukup besar namun cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2004 sampai sekarang.

Disisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2006 terutama didorong oleh sektor bangunan dimana terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi ditambah pembangunan oleh swasta (terutama ruko, hotel dan perumahan). Selain itu, pertumbuhan yang terjadi pada hampir seluruh sektor kecuali sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan ikut berperan pada pertumbuhan ekonomi NAD.

Disisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi. Sedangkan ekspor-impor mengalami penurunan.

Sementara itu, komitmen investasi sampai dengan triwulan I-2007 tercatat 4 PMDN dan 1 PMA. Meskipun belum ada laporan realisasi investasi untuk tahun 2006 lalu yang masuk ke BKPM, diperkirakan sudah terdapat komitmen investasi yang direalisasikan misalnya investasi pada bidang hotel dan restoran.

Ekspor-impor non migas NAD pada triwulan I-2007 tercatat defisit US\$0,79 juta. Meskipun demikian ekspor mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya terutama pada komoditi kayu, kopi dan coklat. Sedangkan impor mengalami penurunan yang cukup signifikan khususnya impor komoditi gandum dan olahannya.

#### **PERKEMBANGAN INFLASI**

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum di NAD pada triwulan I-2007 diperkirakan mencapai 4,05% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Inflasi tersebut lebih tinggi bila dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2006 sebesar 3,18% (qtq), inflasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,86%(qtq) serta inflasi nasional sebesar 1,91%(qtq). Hal ini berlawanan dengan kecenderungan inflasi nasional yang mengalami penurunan.

Determinan inflasi pada triwulan ini, selain disebabkan oleh masih tingginya demand pada komoditi yang termasuk dalam inflasi inti, hal ini juga disebabkan oleh inflasi pada volatile food akibat terjadi gangguan pada sisi supply (*supply-shock*). Pada triwulan ini jalur distribusi barang Medan-Banda Aceh terganggu, akibat putusnya jalan terjadi *supply* (pasokan) barang yang kurang lancar yang salah satu penyebabnya adalah sempat terputusnya jalur transportasi Medan-Banda Aceh selama beberapa hari akibat banjir di Aceh Tamiang pada bulan Januari lalu. Selain itu, dari sisi demand permintaan barang kebutuhan untuk menyambut Tahun Baru Hijriyah yang meningkat juga ikut menyumbang kenaikan harga-harga kelompok bahan makanan.

Menurut kelompok barang dan jasa, kelompok bahan makanan menyumbang dengan andil sebesar 1,97% atau 48,64% dari total inflasi NAD, yang didorong terutama oleh inflasi sub-kelompok ikan segar, sub-kelompok sayur-sayuran dan sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya. Sedangkan kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada triwulan I-2007 adalah kelompok kesehatan yaitu sebesar 6,38% (qtq) yang didorong kenaikan harga pada sub-kelompok perawatan jasmani dan kosmetika sebesar 9,27% (qtq).

Setelah disagregasi inflasi, inflasi inti NAD menyumbang andil terbesar yaitu 1,93% atau membentuk 47,86% inflasi NAD. Laju inflasi inti mencapai 1,90% (qtq). Sedangkan yang mengalami inflasi tertinggi adalah inflasi volatile food sebesar 2,65%

(qtq). Sementara inflasi administered price hanya sebesar 0,73% (qtq).

#### **PERKEMBANGAN PERBANKAN**

Perbankan menunjukkan peningkatan kinerja positif khususnya dalam hal ekspansi jaringan dan peningkatan penyaluran kredit. Pada triwulan I-2007, terdapat penambahan 1 KC, 2 KCP, 4 KK, dan 2 KU serta 9 ATM. Seiring ekspansi jaringan kantor bank, penyaluran kredit juga tumbuh sebesar 7,7% (qtq) menjadi Rp4,91 triliun. Sedangkan dalam hal penghimpunan dana, terjadi penurunan khususnya pada simpanan Giro yang terkait dengan peningkatan pembayaran secara giral oleh pemerintah daerah maupun swasta.

Penyaluran kredit Bank Umum Konvensional terbesar masih pada kredit konsumsi sebesar 60,3% dari total kredit. Sedangkan menurut pertumbuhannya, kredit modal kerja tumbuh paling tinggi yaitu 8,88% (qtq) sedangkan kredit investasi dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 4% (qtq) dan 5% (qtq). Menurut sektor ekonomi, penyaluran kredit sebagian besar masih diperuntukkan pada sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan nominal sebesar Rp891 miliar, diikuti sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertanian dan sektor jasa dunia usaha. Pertumbuhan tertinggi baik secara nominal maupun persentase terjadi pada kredit untuk sektor konstruksi.

Perkembangan yang hampir sama juga terjadi pada Bank Umum Syariah. Pembiayaan secara nominal paling besar terlihat pada pembiayaan konsumsi yang meningkat Rp12,85 miliar menjadi Rp132,12 miliar. Sedangkan modal kerja tumbuh sebesar Rp8,26 miliar menjadi Rp47,27 miliar dan investasi tumbuh sebesar Rp11,22 miliar menjadi Rp28,77 miliar. Menurut pertumbuhannya, pembiayaan investasi tumbuh paling signifikan yaitu sebesar 63,9% (qtq), sehingga mengurangi dominasi pembiayaan konsumtif yang pada triwulan sebelumnya mencapai 67,8% turun menjadi 63,5%.

Sedangkan kualitas kredit yang disalurkan relatif stabil meskipun sedikit menurun. Rasio NPL/NPF (Non Performing Loan/Finance) Bank Umum mengalami peningkatan dari 1,12% di triwulan IV-2006 menjadi 1,54% pada triwulan I-2007.

Sebagian besar kredit yang disalurkan Bank Umum di NAD tergolong dalam kredit UMKM (Mikro, Kecil dan Menengah) yaitu sebesar 66,3% atau senilai Rp3,26 triliun dari total kredit yang sebesar Rp4,91 triliun. Bila dilihat pertumbuhannya, laju pertumbuhan kredit UMKM relatif rendah yaitu hanya 6,1% (qtq) atau meningkat Rp188 miliar, sedangkan kredit non-UMKM (nominal lebih besar dari Rp5 miliar) tumbuh sebesar 10,9% (qtq). Komposisi terbesar masih dikuasai kredit menengah (kredit dengan nominal antara Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar) yaitu sebesar Rp1,83 triliun dengan pangsa 60%.

BPR menunjukkan kinerja yang menurun terutama dalam hal

intermediasi dan kualitas kredit yang disalurkan. LDR/FDR mengalami penurunan dari 89,60% menjadi 85,76%. Sedangkan kualitas kredit yang disalurkan BPR/S semakin memburuk yang tercermin pada meningkatnya rasio NPL/NPF dari 20,20% menjadi 38,76%.

Sebagaimana dengan periode-periode sebelumnya, pada triwulan I-2007 perputaran uang tunai di KBI Banda Aceh menunjukkan outflow sebesar Rp Rp522 miliar, lebih rendah dibandingkan outflow triwulan IV-2007 yang sebesar Rp1,55 triliun. Penurunan ini seiring dengan berakhirnya hari raya lebaran pada triwulan IV-2006 lalu. Sementara itu jumlah uang palsu yang ditemukan KBI Banda Aceh mengalami peningkatan sebesar 23,93% (qtq) menjadi Rp5.230.000,- atau meningkat dari 72 lembar menjadi 86 lembar upal. Sedangkan transaksi melalui sistem kliring mengalami peningkatan sebesar 2,56% (qtq) menjadi Rp1,24 triliun.

#### **PROSPEK**

Perekonomian NAD untuk triwulan II-2007 diperkirakan tetap tumbuh positif, terutama didorong oleh realisasi APBD NAD yang disahkan pada bulan Mei 2007, dan peningkatan konsumsi masyarakat seiring peningkatan UMP tahun 2007. Sedangkan sumbangan ekspor-impor sendiri diperkirakan relatif tetap mengingat tidak adanya rencana peningkatan produksi migas baik pertambangan maupun industri pengolahan.

Laju inflasi diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I-2007,

karena harga-harga yang sempat melonjak akibat terputusnya jalur distribusi oleh banjir Tamiang kembali normal. Selain itu dari sisi permintaan, diperkirakan juga tidak akan memberikan tekanan berarti karena tidak adanya perayaan keagamaan yang biasanya mendorong permintaan.

Sedangkan kinerja perbankan diperkirakan meningkat, terutama dalam hal penghimpunan DPK, karena jaringan Bank bertambah dengan rencana dibukanya Kantor Cabang Bank Panin di Banda Aceh pada Bulan Juni 2007 nanti, serta penambahan kantor bank baik kantor cabang pembantu maupun kantor kas. Penyaluran kredit juga diperkirakan akan tumbuh moderat sebagaimana triwulan-triwulan sebelumnya karena belum ada sinyal yang pasti dari perbankan untuk meningkatkan kredit secara signifikan. Meskipun penyaluran kredit Peumakmue Aceh yang diluncurkan BPD Aceh akan dimulai, mengingat nominalnya yang relatif

kecil dibandingkan total kredit. Sementara itu, BPR diperkirakan masih berkebutuhan dalam perbaikan kredit bermasalah yang melonjak pada triwulan I-2007. Sementara itu, pada sistem pembayaran diperkirakan terjadi peningkatan yang signifikan baik tunai maupun non-tunai, seiring realisasi APBD NAD tahun 2007 yang baru disahkan bulan Mei.

## BAB I PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI

### A. Tinjauan Umum

Perekonomian NAD selama tahun 2006 kembali tumbuh 2,40% setelah pada tahun 2005 mengalami pertumbuhan *minus* 10,12%. Pertumbuhan ini disumbang sebagian besar oleh sektor bangunan yang pada tahun 2006 ini tumbuh pesat sebesar 48,41% seiring dengan pembangunan infrastruktur untuk proyek rehabilitasi dan rekonstruksi selain pembangunan konstruksi (terutama ruko, hotel dan perumahan) oleh pihak swasta. Meski demikian, secara triwulanan perekonomian NAD diperkirakan kembali mengalami penurunan pada triwulan I-2007 sebesar -3,34% (qtq), karena nilai tambah yang dihasilkan khususnya sektor bangunan masih lebih rendah dibandingkan nilai tambah pada triwulan IV-2006.

Sedangkan struktur perekonomian NAD pada tahun 2006 mengalami pergeseran, dimana sektor pertanian yang sebelumnya merupakan sektor dominan perekonomian NAD diambil alih pertambangan migas akibat kenaikan harga minyak dunia yang meningkat signifikan ditahun 2006. Menurut penggunaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar setelah ekspor (terutama migas) yaitu mencapai 31,46% terhadap total PDRB. Sementara itu, untuk triwulan I-2007 sektor pertanian diperkirakan kembali menjadi penyumbang utama PDRB NAD disebabkan peningkatan volume produksi pertanian.

Secara nominal, besaran PDRB NAD pada tahun 2006 atas dasar harga

berlaku adalah sebesar Rp73,54 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp37,16 triliun.

Sementara itu, komitmen investasi di NAD pada triwulan I-2007 meningkat dibandingkan komitmen tahun 2006 baik pada PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Sedangkan perdagangan internasional NAD pada triwulan I-2007 tercatat defisit sebesar US\$0,79 juta. Secara umum, baik ekspor maupun impor nilainya relatif lebih kecil dibandingkan triwulan IV-2006.

### B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi NAD tahun 2006 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2005, baik dengan migas maupun tanpa migas. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2006 mencapai 2,40%, meningkat bila dibandingkan pertumbuhan tahun 2005 yang *minus* 10,12%. Sedangkan pertumbuhan tanpa migas mencapai 7,70%, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1,22%.

**Tabel 1.1  
Pertumbuhan Sektoral NAD**

LAPANGAN USAHA	2004	2005*	2006**
Pertanian	6,04	-3,89	1,52
Pertambangan dan Penggalian	-24,06	-22,62	-2,58
Industri Pengolahan	-17,80	-22,30	-7,89
Listrik, Gas dan Air Bersih	19,54	-1,95	12,06
Bangunan	0,92	-16,14	48,41
Perdagangan, Hotel & Restoran	-2,68	6,64	7,41
Pengangkutan & Komunikasi	3,67	14,39	10,99
Keuangan, Persewaan & Js	19,45	-9,53	11,77
Jasa-jasa	20,14	9,65	4,41
<b>PDRB</b>	<b>-9,63</b>	<b>-10,12</b>	<b>2,40</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>1,76</b>	<b>1,22</b>	<b>7,70</b>

\*angka diperbaiki

\*\*angka sementara  
Sumber : Badan Pusat Statistik NAD, diolah

Pertumbuhan hampir terjadi diseluruh sektor, kecuali sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan yang mengalami penurunan output masing-masing sebesar -2,58% dan -7,89%. Peningkatan output diberbagai sektor secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain : (1) Kondisi politik yang stabil pasca Pilkada yang berlangsung aman dan demokratis, (2) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang semakin meningkat terutama di sektor konstruksi, dan (3) Mulai bermunculannya usaha baru (khususnya lokal) disamping peningkatan volume usaha yang sudah *existing*. Sedangkan penurunan output pada sektor pertambangan diperkirakan akibat menurunnya volume produksi sub-sektor migas terkait penurunan cadangan migas di NAD. Hal ini berimbas pada penurunan volume produksi migas yang akhirnya berkontribusi pada penurunan output sektor industri pengolahan. Meskipun demikian, nampaknya industri non-migas tampaknya tetap tumbuh, melihat penyaluran kredit untuk sektor industri pengolahan yang meningkat .

Pada tahun 2006, sektor bangunan mengalami pertumbuhan paling pesat yaitu mencapai 48,41% meningkat dibanding tahun sebelumnya yang *minus* 16,14%. Selain pembangunan perumahan dan infrastruktur terkait program rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan ruko, hotel dan bangunan lainnya yang tumbuh marak tampaknya berkontribusi pada pertumbuhan tersebut. Asumsi tersebut diperkuat dengan penyaluran kredit pada sektor

konstruksi yang juga mengalami peningkatan pesat sebesar 69,64% (yoy).

Pertumbuhan yang cukup signifikan (12,06%) juga tampak pada sektor listrik, gas dan air bersih, tampaknya disumbang oleh sub-sektor listrik dengan adanya peningkatan penyaluran listrik akibat bertambahnya pembangunan rumah, gedung ataupun ruko yang saat ini sedang marak. Seiring dengan hal tersebut, penyaluran kredit oleh perbankan pada sektor tersebut juga mengalami peningkatan yang mengejutkan yaitu sebesar 214% meskipun dalam nominal yang relatif kecil bila dibandingkan sektor lainnya.

Pertumbuhan pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pengangkutan & komunikasi, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor jasa dunia usaha tampaknya tidak terlepas dari peran perbankan dalam pembiayaan, yang tergambar pada meningkatnya penyaluran kredit untuk sektor-sektor tersebut (Bab III).

Menurut data prakiraan BPS NAD (tabel 1.2), pada triwulan I-2007 pertumbuhan ekonomi (quarter to quarter) diperkirakan negatif. Output yang dihasilkan pada triwulan I-2007 lebih rendah -5,44% bila dibandingkan triwulan lalu. Bila dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu, maka penurunan outputnya sebesar 3,44%.

**Tabel 1.2**  
**Perkiraan Pertumbuhan Sektoral**  
**Triwulan I-2007**

LAPANGAN USAHA	persen	
	Tw.1-07 thd Tw.IV-06***	Tw.1-07 thd Tw.I-06***
Pertanian	1,97	8,01
Pertambangan dan Penggalian	-5,82	-7,33
Industri Pengolahan	-3,59	12,33
Listrik, Gas dan Air Bersih	4,81	8,24
Bangunan	-49,33	-53,36
Perdagangan, Hotel &	3,00	-11,31

Restoran		
Pengangkutan & Komunikasi	0,60	-4,66
Keuangan, Persewaan & Js		
Perusahaan	-4,63	-5,27
Jasa-jasa	-13,96	-0,56
<b>PDRB</b>	<b>-5,44</b>	<b>-3,44</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>-5,85</b>	<b>-5,19</b>

\*\*\*angka perkiraan

Sumber : Badan Pusat Statistik NAD, diolah

Bruto		
Perubahan Inventori	82,78	138,25
Ekspor	-30,41	-7,56
Dikurangi : Impor	586,12	28,72
<b>PDRB</b>	<b>-10,12</b>	<b>2,40</b>

\*angka diperbaiki

\*\*angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik NAD, diolah

Penurunan output terbesar terjadi pada sektor bangunan, dimana pada triwulan I-2007 terjadi penurunan sebesar 53,36% dibandingkan triwulan I-2006 dan bila dibandingkan triwulan IV-2006 terjadi penurunan sebesar 49,33%. Penurunan ini wajar mengingat banyaknya proyek konstruksi pada tahun 2006 yang merupakan masa-masa awal proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta baru tumbuhnya sektor dunia usaha di NAD. Namun diperkirakan pada triwulan yang akan datang, proyek konstruksi akan kembali meningkat seiring pembangunan oleh pemerintah setelah APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) disahkan pada Bulan Mei 2007, dan proyek swasta lainnya seiring tingkat suku bunga dan stabilitas keamanan politik yang semakin kondusif.

Menurut penggunaan (tabel 1.3), seluruh komponen penggunaan mengalami pertumbuhan, kecuali komponen ekspor yang masih negatif. Investasi (PMTB) tumbuh sebesar 26,81% lebih rendah dibanding tahun 2005 yang tumbuh sebesar 89,71%. Meskipun realisasi investasi masih rendah diperkirakan kedepannya akan meningkat tajam dengan mempertimbangkan komitmen investasi yang meningkat cukup tinggi.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan**

Penggunaan	2005*	2006**
Konsumsi Rumah Tangga	35,80	3,16
Konsumsi Pemerintah	34,83	15,12
Pembentukan Modal Tetap	89,71	26,81

### C. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian NAD masih didominasi oleh migas melalui sektor pertambangan maupun sektor industri pengolahan (tabel 1.4). Sektor pertambangan migas mencapai 25,36% dari total PDRB, mengalami peningkatan pangsa dari tahun 2005 yang sebesar 22,50%. Perubahan komposisi ini bukan disebabkan peningkatan produksi migas karena output pertambangan migas sendiri turun sebesar 4,27%, namun lebih disebabkan kenaikan harga gas bumi pada tahun 2006.

Bila kontribusi migas tidak diperhitungkan, sektor pertanian merupakan kontributor utama pada perekonomian NAD, yaitu sebesar 24,74%, sedikit menurun bila dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 26,69%. Hal ini disebabkan peningkatan kontribusi sektor bangunan, dari sebelumnya hanya 3,22% menjadi 5,72% pada tahun 2006. Secara umum, struktur perekonomian NAD tidak banyak berbeda, kecuali pergeseran kontributor utama dari sektor pertanian di tahun 2005, menjadi

sektor pertambangan (khususnya migas) di tahun 2006.

**Tabel 1.4**  
**Kontribusi Sektoral NAD**

LAPANGAN USAHA	2005*	2006**
Pertanian	26,69	24,74
Pertambangan dan Penggalian	23,12	26,23
a. migas	22,50	25,36
b. non migas	0,62	0,88
Industri Pengolahan	18,01	15,80
a. migas	15,26	13,59
b. non migas	2,76	2,21
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,20	0,18
Bangunan	3,22	5,72
Perdagangan, Hotel & Restoran	12,44	11,02
Pengangkutan & Komunikasi	5,15	6,02
Keuangan, Persewaan & Js		
Perusahaan	1,47	1,85
Jasa-jasa	9,69	8,44
<b>PDRB</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>62,24</b>	<b>61,05</b>

\*angka diperbaiki

\*\*angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik NAD, diolah

Pada triwulan I-2007, struktur perekonomian kembali bergeser pada sektor pertanian sebagai penyumbang utama perekonomian NAD, yaitu sebesar 27,37%.

**Tabel 1.5**  
**Kontribusi Sektoral NAD**  
**Triwulan I-2007**

LAPANGAN USAHA	Tw.IV-2006	Tw.1-07
Pertanian	23,74	27,37
Pertambangan dan Penggalian	25,57	22,77
Industri Pengolahan	17,16	17,97
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,17	0,21
Bangunan	6,33	2,51
Perdagangan, Hotel & Restoran	11,72	14,10
Pengangkutan & Komunikasi	5,16	4,44
Keuangan, Persewaan & Js		
Perusahaan	1,57	1,14
Jasa-jasa	8,57	9,50
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>59,93</b>	<b>62,51</b>

\*\*\*angka perkiraan

Sumber : Badan Pusat Statistik NAD, diolah

Sedangkan menurut penggunaan, Ekspor (khususnya migas) masih menjadi kontributor utama perekonomian NAD dengan pangsa sebesar 41,02%. Sedangkan peringkat kedua adalah konsumsi rumah tangga sebesar 31,46%. Sedangkan investasi sendiri masih rendah kontribusinya yaitu hanya 13,78%.

**Tabel 1.6**  
**Kontribusi PDRB (dengan migas)**  
**Menurut Penggunaan**

Penggunaan	2005*	2006**
Konsumsi Rumah Tangga	31,72	31,46
Konsumsi Pemerintah	16,95	17,80
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,80	13,78
Perubahan Inventori	1,34	2,67
Ekspor	53,46	41,02
Dikurangi : Impor	15,28	6,72
<b>PDRB migas</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\*angka diperbaiki

\*\*angka sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik NAD, diolah

#### D. Investasi

Pada tahun 2006 lalu, tercatat 3 PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 8 PMA (Penanaman Modal Asing) yang komitmen untuk berinvestasi di NAD. Investasi PMDN yang masuk tercatat sebesar Rp.218,62 miliar dengan rencana penyerapan tenaga kerja sebanyak 3 TKA (Tenaga Kerja Asing) dan 1043 TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Sedangkan investasi PMA tercatat sebesar US\$.2,49 ribu dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 TKA dan 371 TKI. Bila kita bandingkan dengan investasi tahun 2005 lalu yang hanya tercatat 5 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.93,91 miliar, sedangkan untuk PMA sendiri tidak ada investasi baru.

Sampai saat ini, belum ada laporan realisasi resmi PMA dan PMDN yang masuk kepada BKPM NAD. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan dilapangan tampaknya beberapa perusahaan yang berkomitmen sudah mulai beroperasi.

Sementara itu, rencana investasi baru di NAD pada tahun 2007 (data BKPM sampai dengan Maret 2007) tercatat 4 PMDN dan 1 PMA. Investasi oleh PMDN direncanakan sebesar Rp798,22 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 207 TKI dan 4 TKA. Sedangkan untuk PMA direncanakan investasi sebesar US\$145 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 35 TKI dan 4 TKA. Bidang usaha yang akan digarap PMDN antara lain perkebunan kelapa sawit, industri assembling, restoran dan hotel serta industri karet mentah. Sedangkan PMA akan menggarap wisata air di Kota Sabang.

Bila dibandingkan triwulan sebelumnya, ekspor mengalami peningkatan sebesar US\$0,54 juta, sedangkan impor turun sebesar US\$7,2 juta. Peningkatan ekspor NAD, terutama ditunjang oleh ekspor kelompok crude material and edible, yaitu komoditi kayu, selain itu juga kelompok food and live animals dengan komoditi utama kopi dan coklat.

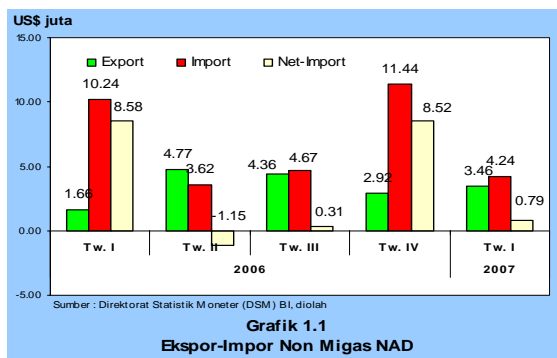
**Tabel 1.7**  
**Trend Ekspor-Impor NAD**  
**menurut Klasifikasi SITC**

KELOMPOK KOMODITI	Ekspor		Impor	
	Tw. IV-06	Tw. I-07	Tw. IV-06	Tw. I-07
0 - FOOD AND LIVE ANIMALS	1,11	3,24	5,42	0,74
1 - BEVERAGES & TOBACCO	0	0	0	0
2 - CRUDE MATERIALS, INEDIBLE	0,99	10,58	0	0
3 - MINERAL FUELS, LUBRICANTS ETC	0	0	0	0
4 - ANIMAL & VEGETABLE OILS&FATS	0	0	0	0
5 - CHEMICAL	1,34	0	0,57	0,03
6 - MANUFACTURED GOODS	0	0	4,74	3,06
7 - MACHINERY & TRANSPORT EQP	0,42	0,19	0,38	0,42
8 - MISC. MANUFACTURED ARTICLES	0,04	0,01	0,32	0,02
9 - COMMODITIES & TRANSACTION NES	0	0	0	0

Sumber : Web Direktorat Statistik Moneter BI, diolah

**E. Ekspor Impor**

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bank Indonesia (Grafik 1.1), jumlah ekspor non-migas Provinsi NAD berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) untuk triwulan I-2007 mencapai US\$3,46 juta. Sedangkan nilai impor mencapai US\$4,24 juta sehingga neraca perdagangan internasional non-migas NAD untuk triwulan I-2007 tercatat defisit sebesar US\$0,79 juta.



Halaman ini sengaja dikosongkan.  
*This page is intentionally blank*

## BOKS 1 : Pengembangan Kawasan Sabang

Menilik sejarah kebelakang, Pelabuhan Sabang telah berperan penting sebagai pelabuhan alam untuk pelayaran internasional terkait perdagangan ekspor komoditi hasil alam Aceh ke Eropa, sehingga kawasan Sabang menjadi salah satu pusat perekonomian bagi Aceh. Setelah beberapa kali mengalami perubahan status sebagai pelabuhan bebas (free-port), akhirnya Sabang kembali ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2000. Meskipun demikian, sampai saat ini kawasan Sabang belum menunjukkan aktivitas yang marak seperti era tahun 1980 an, dimana banyak keluar masuk barang dari luar negeri. Menurut Kepala BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang), kuantitas dan jenis barang yang masuk ke Sabang saat ini jumlahnya sedikit. Karena banyak barang kebutuhan masyarakat yang sudah mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri, sehingga barang-barang yang layak secara ekonomis diimpor Sabang semakin berkurang, kecuali barang-barang elektronik dari RRC (Republik Rakyat Cina). Selain itu masalah infrastruktur yang belum memadai juga masih kendala.

### KEUNGGULAN

Sabang mempunyai keunggulan dari segi letak geografis dan pelabuhan laut dalam yang unggul.

- a. Letak geografis yang strategis.

Kawasan Sabang terletak pada koordinat 05°54'28 " Lintang

Utara dan 95°22'36" Bujur Timur yang sangat strategis karena berada pada jalur lalu lintas pelayaran (*Internasional Shipping Line*) dan penerbangan internasional. Selain itu, rencana pembangunan Terusan Kra (*Canal Kra*) di Thailand dapat memposisikan Sabang sebagai *Buffer Zone* bagi kapal-kapal yang melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia. Selain itu jalur lalu lintas perdagangan antara kawasan barat dan timur dapat menghemat biaya sebesar 20 % bila dialihkan melewati Sabang.

- b. Pelabuhan laut dalam

Kolam pelabuhan alam Sabang yang mencapai kedalaman 22 meter merupakan keunggulan tersendiri, karena dapat menampung kapal ukuran kargo (generasi 5, 6 dan 7) yang mensyaratkan kedalaman kolam untuk berlabuh minimal 15 meter. Perkembangan terakhir dunia perkapalan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada penggunaan kapal kargo raksasa tersebut.

### POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN SABANG

BPKS selaku pihak yang ditunjuk sebagai pengelola (seperti otorita Batam) telah mengidentifikasi potensi yang dimiliki Sabang sebagai berikut :

- 1) Potensi Pengembangan kawasan berdasarkan kepada Pelayanan Sabang Hub Internasional Port (SHIP)

2) Potensi pengembangan kawasan berdasarkan kepada Pelayanan Perdagangan Bebas

3) Potensi pengembangan kawasan berdasarkan kepada Sektor Prioritas dan Sektor Andalan

Sedangkan yang ditetapkan sebagai Sektor Prioritas dan Sektor Andalan adalah sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>Sektor Prioritas 1: Jasa Kepelabuhanan</b>		
	1 Pelabuhan Internasional Hub	Sabang	62 Ha
	2 Pelabuhan Nasional	Balohan	25 Ha
	3 Pelabuhan Penyeberangan Internasional	Gapang	3 Ha
	4 Pelabuhan Penyeberangan	Deudap	2 Ha
	5 Pelabuhan Penyeberangan	Pantai Nipah	2 Ha
<b>2</b>	<b>Sektor Prioritas 2: Industri &amp; Perdagangan</b>		
	1 Kawasan Industri	Balohan	180 Ha
	2 Kawasan Industri & Perdagangan Otomotif	Sabang	5 Ha
	3 Kawasan Industri Perikanan	Lampuyang	8 x 16 Ha
	4 Kawasan Industri Trade & Promotion Center	P. Klah	9,2 Ha
	5 Kawasan Bunker dan Pelabuhan BBM	Lhok Pria Laot	20 Ha
	6 Kawasan Dil Refinery	Lhok Pria Laot	100 Ha
<b>3</b>	<b>Sektor Prioritas 3: Pariwisata</b>		
	1 Kawasan Wisata Bahari	Iboh. Gapang	300 Ha
	2 Kawasan Wisata Kota Lama	Sabang	20 Ha
	3 Kawasan Resort International	P. Breuh Utara	200 Ha
	4 Kawasan Wisata Kelautan (Taman Tematik)	P. Klah	1,8 Ha
	5 Kawasan Resort & Lap. Golf Internasional	Gua Sarang Paya	200 Ha
	6 Komol. MICE & Kondominium	Iboh	10 Ha
	7 Kawasan Wisata Bahari	Pantai Nipah	50 Ha
	8 Penataan dan Renovasi Tugu Km. 0	Km. 0	5 Ha
	9 Perbaikan Lingk. & Terumbu Karang	Iboh	100 Ha
<b>4</b>	<b>Sektor Prioritas 4: Perikanan</b>		
	1 Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)	Lampuyang	10 Ha
	2 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Krueng Raya	3 Ha
	3 PPI (2 lokasi)	Ie Meleu. Lameng	2 x 3 Ha
	4 PPI (2 lokasi)	Jaboi. Lapeng	2 x 3 Ha
	5 Kaw. Budi Daya&Balai Benih Perikanan Samudra	Lhok Lhen Bae	8 x 10 Ha
	6 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Meulingge	5 Ha
	7 Peningkatan PPI ke PPP (4 lokasi)	No. 3 dan 4	4 x 5 Ha
	8 Peningkatan PPP ke PPN (Nasional)	No. 6 dan 7	5 x 8 Ha
	9 Peningkatan PPN ke PP3 (Samudra)	No. 6 dan 7	5 x 10 Ha
<b>5</b>	<b>Sektor Andalan 1: Kelembagaan</b>		
	1 Pengembangan Prasarana, Sarana dan SDM	BPKS	15 Paket
	2 Pengembangan Iklim Bisnis dan Investasi	Dalam&Luar Negeri	15 Paket
	3 Balai Tng. Ker. Prof. Di 4 Sektor Prioritas	Sabang Lampuyang	24 Unit
	4 Promosi dan Kerjasama Investasi	Dalam&Luar Negeri	15 Paket
	5 Peningkatan Ekspor. Non Migas & Prod. Ekspor	Kaw. Sabang	15 Paket
	6 Penb. dan Peningkatan Aplikasi E-Gov	P. Weh	3 Paket
<b>6</b>	<b>Sektor Andalan 2: Infrastruktur</b>		
	1 Jalan dan Jembatan	Kaw. sabang	
	a Peningk. Jl. Balohan-Aroi Itam-Sabang (ROW:35m)	P. Weh	22.1 Km
	b Peningk. Jl. Balohan-Cot Ba'u-Sabang (ROW:24m)	P. Weh	11 Km
	c Peningk. Jl. Balohan - Paya (ROW: 24m)	P. Weh	12 Km
	d Peningk. Jl . Paya-Lho Ba Jumpa-Sabang(ROW:24m)	P. Weh	7.6 Km
	e Peningk. Jl. Km 0 - Lho Ba Jumpa (ROW: 24m)	P. Weh	19.7 Km
	f Peningk. Jl. Paya - Lh Angen (ROW: 24m)	P. Weh	13.3 Km
	g Peningk. Jl. Deudap - Pantai Nipah (ROW: 24m)	P. Nasi	4.6 Km
	h Peningk. Jl. Pantai Nipah - Lampuyang (ROW:24m)	P. Breuh. P. Nasi	5.1 Km
	i Peningk. Jl. Lampuyang-Lhok Lhen Bale (ROW:24m)	P. Breuh	13.6 Km
	j Peningk. Jl. Keliling P. Nasi (ROW: 14m)	P. Nasi	10 Km
	k Peningk. Jl. Keliling P. Breuh (ROW: 14m)	P. Breuh	30 Km
	l Peningkatan Jl. Kota (ROW: 14m)	Pusat Kota Sabang	41.1 Km
	m Jembatan Aruin Lampuyang	P. Breuh, P. Nasi	273 m
	n Jembatan P. Klah	P. Weh	393 m
	2 Listrik dan Gas	Kawasan Sabang	120 MW
	Power Plan: Panas Bumi	Jaboi	30 MW
<b>3</b>	<b>Air Bersih</b>		
	Instalasi air bersih	Kawasan Sabang	5.000
	Rehabilitasi kebocoran waduk	Aneuk Laot	46 Ha
	Operasionalisasi waduk	Paya Seunara	136 Ha
	Perbaikan wil. Tangkapan air danau	Aneuk Laot	200 Ha

1	Sektor Prioritas 1: Jasa Kepelabuhanan		
4	Telekomunikasi	Kawasan Sabang	154.258 SST

Sumber : Badan Pengelola Kawasan

Sabang

Sedangkan dalam pelaksanaannya telah ditetapkan program dengan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Percepatan (2007-2011)
  - 1) Menyiapkan peraturan perundang-undangan untuk langkah-langkah jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka panjang (15 tahun- 20 tahun) sebagai upaya tindak lanjut dari penetapan UU No. 11/2006
  - 2) Membangun Pelabuhan Sabang sebagai Pelabuhan Internasional Hub dengan kelengkapan: pelabuhan serbaguna, pelabuhan cargo, pelabuhan peti kemas (container), pelabuhan cair dan dock.
  - 3) Aliansi dengan pelaku internasional dalam jangka menengah s.d. panjang melalui pembentukan perusahaan patungan dengan mayoritas kepemilikan saham dikuasai BPKS
  - 4) Membangun pelabuhan penyeberangan internasional dan domestik
  - 5) Membangun pelabuhan perikanan samudra di luar kawasan pelabuhan sabang
  - 6) Membangun industri di balohan dan industri Oil Refinery, Bunker dan pelabuhan BBM di Pria Laot
  - 7) Membangun industri perikanan di luar kawasan pelabuhan sabang
  - 8) Membangun kawasan wisata bahari
  - 9) Aliansi dengan daerah lain untuk mengembangkan perdagangan, perikanan dan basis pariwisata cruises dunia
  - 10) Memperkuat kelembagaan dengan membentuk Dynamic grup dan meyiapkan serta melaksanakan langkah-langkah jangka pendek sampai menengah.
2. Tahap Transformasi (2012-2016)
  - 1) Peningkatan Pembangunan dan Operasional Sabang Hub Internasional Port (SHIP)
  - 2) Melanjutkan membangun 4 sektor prioritas yakni: jasa kepelabuhanan, industri/perdagangan, pariwisata dan perikanan; serta 2 sektor andalan yakni: kelembagaan dan infrastruktur.
3. Tahap Penguatan (2017-2021)
  - 1) Peningkatan Pembangunan dan Operasional Sabang Hub Internasional Port (SHIP)
  - 2) Peningkatan Pelabuhan untuk Cruiser
  - 3) Pembangunan pusat penelitian maritime
  - 4) Melanjutkan membangun 4 sektor prioritas yakni: jasa kepelabuhanan, industri/perdagangan, pariwisata dan perikanan; serta 2 sektor andalan yakni: kelembagaan dan infrastruktur.

#### PERKEMBANGAN TERBARU PEMBANGUNAN KAWASAN SABANG

Pembangunan kawasan Sabang khususnya pelabuhan bertaraf internasional dibutuhkan total dana sekitar Rp40 triliun selama 15 tahun. Menurut Kepala

BPKS, diperkirakan setelah selesai dibangun Sabang dapat memberikan sumbangan pendapatan minimal Rp8 triliun per tahun. Untuk tahun 2007 dibutuhkan investasi sebesar Rp2 triliun, dimana Rp200 miliar telah diperoleh dari pemerintah, sedangkan sisanya dari investasi swasta. Saat ini telah disepakati kerjasama dengan Dublin-Port Company pada penandatanganan MOU pada 15 Mei 2006 lalu dan dilanjutkan dengan Joint Venture Corporation yang direncanakan pada Juni 2007 yang akan datang.

Sementara itu kondisi pelabuhan Sabang saat ini secara umum cukup memadai sebagai pelabuhan nasional. Namun karena aktivitas pelabuhan masih sangat minim, banyak fasilitas fisik yang belum termanfaatkan. Aktivitas pelabuhan salah satunya adalah bongkar-muat khususnya terkait masuknya barang-barang seperti gula, tepung, aneka soft drink, minyak makan, semen dan kebutuhan pokok lainnya selain mobil eks-Singapura.

Selain itu untuk pengembangan sektor prioritas, BPKS masih terkendala dengan ketersediaan lahan yang sebagian besar masih dikuasai oleh masyarakat, berbeda halnya dengan Otorita Batam yang memang memiliki lahan untuk segera dikembangkan.

#### REKOMENDASI

Untuk pengembangan kawasan Sabang, mulai dari infrastruktur pelabuhan dan pendukungnya serta pengembangan 4 sektor prioritas dan 2 sektor andalan tentunya membutuhkan investasi dana yang besar dengan jangka waktu pengembalian yang cukup lama (15 tahun). Hal ini tentunya membutuhkan pembiayaan yang dapat diperoleh dari luar pemerintah (swasta) yang salah satunya adalah perbankan. Perbankan pada dasarnya siap untuk menyalurkan kredit bagi pengembangan kawasan Sabang sepanjang proyek yang ditawarkan feasible dan bankable. Oleh karena itu, masing-masing pihak dapat mempersiapkan diri untuk menyambut proyek yang prospektif tersebut, dengan cara :

- a. Pihak BPKS perlu segera memetakan dan menyusun analisa kelayakan proyek-proyek yang cocok dibiayai oleh perbankan. Sehingga tidak perlu menunggu investasi asing untuk membiayai proyek pengembangan tersebut. Hal ini bisa dimulai dari proyek-proyek berskala kecil dan berjangka waktu tidak terlalu panjang sesuai skim kredit pada umumnya (maksimal 5 tahun).
- b. Selain itu, pihak BPKS dapat mempertemukan investor yang berniat membiayai proyek namun kekurangan dalam pembiayaan dengan pihak perbankan, sehingga peluang investasi tidak lepas begitu saja.
- c. Pihak perbankan perlu proaktif mengkaji peluang proyek-proyek sesuai skim kredit yang dimiliki. Selain itu juga perlu dikembangkan skim kredit baru yang sesuai dengan karakteristik proyek pengembangan kawasan Sabang tersebut.

Secara umum, pengembangan kawasan Sabang tersebut perlu dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara BPKS, pemerintah kota Sabang, unsur masyarakat, investor dan perbankan agar dapat menyelesaikan hambatan yang muncul dengan

baik misalnya potensi permasalahan pembebasan lahan dari masyarakat yang tampak didepan mata.

(Sumber : Seminar "Pelabuhan Bebas (Freeport) Sabang : Antara Harapan dan Kenyataan ")

## **BOKS 2 : Dampak Banjir Bandang Aceh Tamiang**

Di penghujung tahun 2006 Provinsi Aceh kembali mendapat ujian dari Yang Maha Kuasa. Tujuh Kabupaten di Provinsi NAD dilanda banjir bandang yang meliputi Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah. Dampak banjir bandang ini sedikitnya merusak 38.049 rumah masyarakat (rusak ringan 25.710 unit, berat 9.106 unit, dan hanyut 3.223 unit), merenggut 81 korban jiwa, 155 orang dinyatakan hilang serta 208.475 jiwa mengungsi. Selain itu banjir tersebut juga telah merusak ratusan bangunan sekolah, fasilitas kesehatan 173 unit, jalan 552,5 km, dan jembatan sebanyak 48 unit.

Di Kabupaten Aceh Utara banjir merendam 9 kecamatan (72 desa), di Kab. Gayo Lues 4 kecamatan (22 desa), Kab. Bener Meriah 6 kecamatan (39 desa), Kab. Aceh Tengah 3 kecamatan (6 desa), Kab. Aceh Tamiang 12 kecamatan (191 desa). Kabupaten Gayo lues dan Bener Meriah, meski jumlah kecamatan/desa yang terlanda banjir paling sedikit, tapi justru merupakan daerah yang paling sulit dijangkau bantuan karena sulitnya medan. Bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya, banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang memiliki dampak yang cukup parah dan luas terhadap daerah Aceh Tamiang itu sendiri, dan daerah lainnya. Hal ini disebabkan Aceh Tamiang merupakan daerah strategis yang merupakan jalur penghubung antara Provinsi NAD dan Sumatra Utara.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kabupaten yang paling parah terlanda banjir, 80% daerah di Kabupaten berpenduduk sekitar 240.000 jiwa ini mengalami kerusakan serius. Bahkan ada desa di Aceh Tamiang yang tertinggal hanya tujuh sampai 15 rumah, yang lainnya hilang tanpa bekas diterjang banjir bandang. Menurut perkiraan petugas pendataan Satlak Penanggulangan bencana dan pengungsi Aceh Tamiang, bila dihitung dengan tingkat kerusakan harta masyarakat, fasilitas umum dan sarana sosial, termasuk rumah ibadah diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Meskipun angka kerugian secara resmi belum diumumkan Pemkab Aceh Tamiang, namun diyakini angka kerugian akibat banjir bandang tersebut lebih dari Rp100 miliar. Dalam bencana tersebut dilaporkan 1.466 sapi mati/hilang, 15.749 hektar lahan pertanian rakyat rusak, seluas 1.940 hektar palawija mati, serta sebanyak 6.003 kambing dan 124.448 unggas milik masyarakat hilang ditelan banjir. Perkebunan karet dan coklat yang menjadi andalan Aceh Tamiang pun terimbas. Tempurung kelapa yang sudah berisi sadapan karet sirna terbawa banjir. Tanam coklat jika terendam air akan layu, dan kemudian mati.

Sedangkan untuk kerusakan fisik bangunan dilaporkan 2.303 rumah hanyut, 8.747 rusak berat dan 14.950 unit rusak ringan. Sarana sosial berupa rumah ibadah yang rusak sebanyak 60 unit, sekolah 164 unit, jembatan rusak 1.348 meter serta jalan provinsi/kabupaten sepanjang 49 km. Kerugian besar juga dialami oleh petani tambak (petambak) di Aceh

Tamiang. Ribuan petambak kehilangan mata pencaharian karena areal tambak mereka telah hancur dan tertimbun lumpur banjir bandang yang tebal, sudah mengering dan keras sekali. Saat ini tambak-tambak tersebut tidak direhab lagi dan dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya dengan alasan tidak ada dana. Kepala Kantor Perikanan dan Kelautan Aceh Tamiang, Ir. Fuadi menyebutkan bahwa akibat musibah banjir tersebut petambak mengalami kerugian Rp33 milyar lebih. Bantuan yang sangat mendesak antara lain penyediaan alat berat untuk perbaikan tambak yang kemudian disertai bantuan benih udang, ikan, dan kepiting. Permasalahan lainnya yang timbul adalah kebutuhan air bersih. Sumur-sumur yang tertimbun lumpur menyebabkan kesulitan bagi warga untuk memperoleh air bersih.

Aktivitas ekonomi di Aceh Tamiang juga mengalami gangguan akibat musibah ini. Perputaran uang terutama disektor riil mengalami kendala, salah satunya karena banyaknya dana pihak ketiga yang belum dibayar oleh Pemerintah Kab. Aceh Tamiang. Rekanan Pemda yang telah menyelesaikan proyeknya mengalami hambatan dalam pembayaran, hal ini disebabkan dokumen-dokumen mengalami kerusakan bahkan hilang diterjang banjir. Diperkirakan Rp100 miliar lebih dana pihak ketiga yang belum dibayar oleh Pemda.

Selain merupakan daerah yang paling parah terkena banjir, Kab. Aceh Tamiang juga merupakan daerah yang menghubungkan Provinsi NAD dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga banjir yang melanda Aceh Tamiang menimbulkan dampak ke daerah-

daerah lainnya di Provinsi NAD walaupun daerah tersebut tidak dilanda banjir. Dampak utama banjir yang melanda Aceh Tamiang adalah putusnya jalur transportasi darat Medan-Aceh, yang menyebabkan jalur distribusi barang baik yang masuk maupun keluar Aceh terputus.

#### **PERMASALAHAN PASCA BANJIR**

Selama ini barang-barang kebutuhan masyarakat Aceh sebagian besar dipasok dari luar Aceh (mayoritas dari Medan), dan jalur distribusi barang-barang tersebut umumnya melalui jalur darat. Akibat putusnya jalur distribusi yang disebabkan banjir yang melanda Aceh Tamiang secara langsung mempengaruhi kelangkaan barang-barang kebutuhan hidup masyarakat Aceh. Sesuai hukum ekonomi dimana kelangkaan barang menyebabkan harga barang naik, hal tersebut terjadi di Aceh pasca musibah banjir bandang.

Seminggu setelah terjadinya musibah banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang, dampak terputusnya jalur darat Aceh-Medan mulai dirasakan oleh warga sepanjang pesisir timur. Stok kebutuhan bahan pokok (bako) mulai kritis, akibat tidak adanya pasokan baru. Warga Kota Langsa, Aceh Utara dan Lhokseumawe paling merasakan kejutan pasar tersebut, karena ada harga bako yang naik 100 persen dan bahkan hilang dari pasaran. Trend ketersediaan bako yang menipis yang diikuti kenaikan harga juga terjadi di Banda Aceh dan sekitarnya.

Di Aceh Utara dan Lhokseumawe jenis barang yang harganya melonjak terjadi pada barang gula pasir yang

sebelumnya dijual Rp5.000/kg naik menjadi Rp7.000/kg. Selain itu minyak goreng dari harga Rp6.200/kg naik jadi Rp10.000/kg, telur ayam Rp14.000/papan naik menjadi Rp16.000/papan, susu biasanya Rp6.000/kaleng naik jadi Rp7.000/kaleng. Selain itu mie instan dan beras juga mengalami kenaikan 5 % - 10%. Demikian juga harga ikan yang naik bervariasi dari 25% sampai 100%. Selain harga bahan pokok, selama banjir harga berbagai jenis bahan bangunan juga naik, seperti semen andalas biasanya Rp28.500/zak ukuran 40 kg naik menjadi Rp30.000/zak, dan besi tipe 10 x 10 meter biasanya Rp32.000/batang naik menjadi Rp34.000/batang. Kenaikan harga barang-barang tersebut berpengaruh pada tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe yang pada bulan Desember sebesar 1,89%, naik dari bulan November yang hanya 0,64%. Kenaikan inflasi ini disumbangkan dari kelompok bahan makanan dan transpor, komunikasi dan Jasa keuangan sebagai kelompok yang mengalami kenaikan paling besar. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, terjadi keadaan yang bertolak belakang, karena pada Desember 2005 justru terjadi deflasi sebesar 0,04%.

Kota Langsa yang merupakan daerah yang bersebelahan langsung dengan Kab. Aceh Tamiang juga mengalami dampak kenaikan harga akibat terputusnya jalur distribusi. Harga bahan pokok rata-rata naik tajam. Salah seorang pedagang di pasar Langsa mengatakan sebelum banjir, harga tomat hanya Rp4.000/kg, dan setelah empat hari pasca banjir harga

naik menjadi Rp16.000/kg. Begitu juga dengan harga telur dari Rp18.000/papan menjadi Rp39.000/papan. Menurut pedagang tersebut kenaikan harga barang disebabkan macetnya pasokan baru bahan pokok dari luar daerah karena banjir besar banyak mobil pengangkut bahan pokok terjebak banjir. Akibat kenaikan harga bako omset para pedagang ikut menurun secara drastis karena daya beli masyarakat melemah, masyarakat enggan pergi belanja ke pasar mengingat semua harga barang naik. Dampak banjir yang melanda Aceh Tamiang juga dirasakan sampai dengan Kota Banda Aceh dengan naiknya harga bahan pokok

#### **PERMASALAHAN DI MASA YANG AKAN DATANG**

Permasalahan saat ini dan ke depannya yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengangguran. Rusaknya lahan pertanian, tambak dan usaha-usaha lainnya di daerah yang dilanda banjir menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Bahkan di aceh Tamiang terdapat sebuah desa yakni Desa Pematang Durian Kec. Sekrak kini tinggal kenangan. Desa yang terkenal dengan banyaknya batang durian, kini tak sebatangpun tersisa lagi. Semua pohon durian milik warga termasuk pohon yang besar-besar terangkat akarnya digerus banjir. Kini Desa tersebut tinggal nama dan tak lagi menghasilkan durian seperti tahun-tahun sebelumnya. Nyaris semua warga yang tinggal di desa tersebut kini tak lagi memiliki pekerjaan tetap sebagai petani. Warga setempat merupakan petani tanaman keras yang ditanam di halaman rumah dan kebun-

kebun milik mereka sendiri. Tanaman durian, langsung, coklat, sawit, mangga dan pisang banyak terdapat di desa ini. Namun setelah bencana banjir yang melanda Aceh tamiang, kebun-kebun dan tanaman keras seperti pohon durian dan langsung serta coklat nyaris musnah semuanya.

Selain pengangguran permasalahan lainnya yang harus segera ditangani adalah perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana umum. Jalan, jembatan, bendungan selain digunakan untuk keperluan umum juga merupakan sarana penunjang aktivitas ekonomi. Seperti jalan di Kampung Jawa Sei Liput Kec. Kejuruan Muda yang mengalami rusak parah sehingga sulit dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Sementara jalan ini merupakan jalan utama yang digunakan warga beberapa desa yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Warga dari beberapa desa tersebut umumnya bermata pencaharian sebagai petani dengan hasil tanaman utama adalah padi. Tapi karena kondisi jalan yang rusak parah, terpaksa mereka mengeluarkan ongkos tinggi untuk membawa hasil panennya ke pasar, mengingat ongkos angkutan (mobil) melonjak drastis dengan alasan jalan sangat buruk. Oleh karena perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan mutlak segera dilakukan guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar menggeliat kembali.

#### **AKTIVITAS PERBANKAN**

Banjir yang melanda Aceh tanggal 22 Desember 2006 menyebabkan beberapa kantor bank tidak dapat melakukan kegiatan operasional. Hal ini

disebabkan terendahnya kantor-kantor bank tersebut dengan kedalaman bervariasi sampai dengan kedalaman 170 cm. Adapun bank-bank yang tidak dapat beroperasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Rakyat Indonesia
  - a. Unit Sungai Liput
  - b. Unit Kuala Simpang
  - c. Unit Pasar Pagi
  - d. Unit Kejuruan Muda
  - e. Unit Tualang Cut
  - f. Unit Tamiang
  - g. KCP Kuala Simpang
2. PT Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuala Simpang
3. PT Bank Danamon Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pasar Kuala Simpang

Namun tutupnya kantor-kantor bank tersebut tidak berlangsung lama, setelah air surut mereka langsung beroperasi kembali. Seminggu pasca banjir tepatnya tanggal 27 dan 29 Desember 2007 perbankan yang dilanda banjir telah melakukan kegiatan operasional kembali.

Kerugian yang dialami perbankan akibat banjir tersebut mungkin tidak terlalu signifikan, karena kerusakan bangunan tidak parah. Namun yang perlu diperhatikan adalah kerugian munculnya potensi kredit macet. Karena akibat musibah banjir yang melanda Aceh, banyak nasabah yang mengalami kerugian usaha akibat hancurnya usaha warga diterjang banjir. Salah satu contoh adalah nasabah Bank Mandiri Lhokseumawe yang mengalami kerugian besar karena usaha tambak dan budidaya ikan yang dimilikinya hancur dihantam oleh banjir bandang. Belum lagi debitur-debitur perbankan di Aceh tamiang

yang memiliki usaha perdagangan dimana barang-barang dagangan lenyap disapu banjir.

Sumber : Kliping Harian Serambi Indonesia, diolah Kantor Bank Indonesia Lhokseumawe.

## BAB II PERKEMBANGAN INFLASI

### A. Tinjauan Umum

Pada triwulan I-2007 (Maret 2007), kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) di Nanggroe Aceh Darussalam mencapai 4,05% (qtq)<sup>1</sup> dibandingkan bulan Desember 2006 (triwulan IV-2006). Inflasi pada triwulan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan inflasi pada triwulan IV-2006 sebesar 3,18% (qtq), inflasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,86%(qtq) serta inflasi nasional sebesar 1,91%(qtq). Trend peningkatan ini berlawanan dengan kecenderungan inflasi nasional yang menunjukkan penurunan seiring dengan kembali normalnya harga-harga setelah hari raya (triwulan IV-2006) dan masuknya musim panen beras pada triwulan I-2007 yang mendorong peningkatan supply, sehingga inflasi NAD cenderung inelastis.

Setelah disagregasi inflasi, inflasi inti<sup>2</sup> NAD menyumbang andil terbesar yaitu 1,93% atau membentuk 47,86% inflasi NAD yang berarti inflasi NAD pada triwulan I-2007 lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya sisi demand yang disinyalir terkait dengan masih mengalirnya dana bantuan yang masuk

ke NAD dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut kota yang disurvei, Kota Banda Aceh mengalami inflasi sebesar 4,61% (qtq) dengan andil yang dominan membentuk 77,5% inflasi NAD. Sedangkan inflasi Kota Lhokseumawe lebih rendah yaitu sebesar 2,16% (qtq). Apabila dilihat lebih jauh rendahnya inflasi Lhokseumawe dibanding Banda Aceh terjadi sejak Januari 2007. Tampaknya penurunan produksi sektor migas terhadap PDRB NAD ikut mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Lhokseumawe.

Determinan inflasi pada triwulan ini, selain disebabkan oleh masih tingginya demand pada komoditi yang termasuk dalam inflasi inti, hal ini juga disebabkan oleh inflasi pada volatile food akibat terjadi gangguan pada sisi supply (*supply-shock*). Pada triwulan ini jalur distribusi barang Medan-Banda Aceh terganggu, akibat putusnya jalan terjadi *supply* (pasokan) barang yang kurang lancar yang salah satu penyebabnya adalah sempat terputusnya jalur transportasi Medan-Banda Aceh selama beberapa hari akibat banjir di Aceh Tamiang pada bulan Januari lalu. Selain itu, dari sisi demand permintaan barang kebutuhan untuk menyambut Tahun Baru Hijriyah yang meningkat juga ikut menyumbang kenaikan harga-harga kelompok bahan makanan. Secara umum inflasi NAD dipengaruhi oleh kelancaran pasokan barang yang sebagian besar berasal dari Medan, sehingga rawan memberikan tekanan

---

<sup>1</sup> Gabungan dua kota yaitu Banda Aceh dan Lhokseumawe

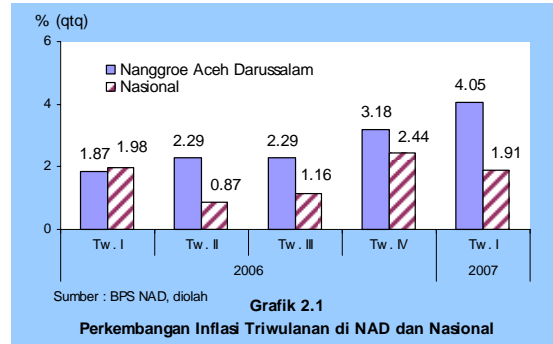
<sup>2</sup> Inflasi inti dihitung dengan mengeluarkan komoditi dari kelompok *administered prices* (barang/jasa yang harganya diatur/ditetapkan oleh pemerintah) dan kelompok *volatile foods* (komoditi bahan makanan yang pergerakan harganya berfluktuasi cukup tinggi) dari seluruh komoditi yang disurvei.

harga ketika jalur distribusi terganggu. Sedangkan dari sisi permintaan (demand), selain faktor seasonal terutama perayaan Agama Islam, secara teoritis peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh faktor jumlah uang beredar di NAD seiring proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan. Asumsi ini didukung oleh kontribusi inflasi inti dalam pembentukan inflasi NAD yang dominan.

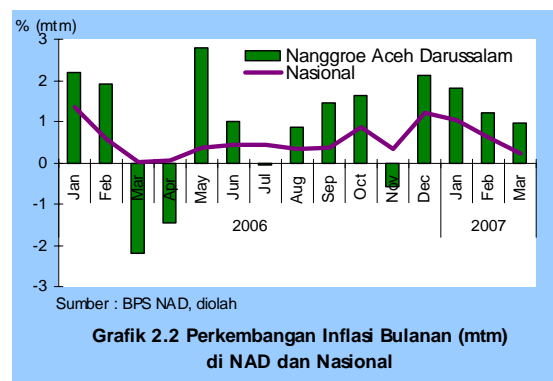
Menurut kelompok barang dan jasa, kelompok bahan makanan menyumbang dengan andil<sup>3</sup> sebesar 1,97% atau 48,64% dari total inflasi NAD, yang didorong terutama oleh inflasi sub-kelompok ikan segar, sub-kelompok sayur-sayuran dan sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya. Sedangkan kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada triwulan I-2007 adalah kelompok kesehatan yaitu sebesar 6,38% (qtq) yang didorong kenaikan harga pada sub-kelompok perawatan jasmani dan kosmetika sebesar 9,27% (qtq).

**B. INFLASI DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Inflasi triwulan I-2007 NAD meningkat dari 3,18% menjadi 4,05% (qtq) melanjutkan tren peningkatan sejak triwulan I-2006. Tren tersebut berlawanan dengan kecenderungan inflasi nasional yang kembali menurun menjadi 1,91% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,44% karena harga-harga kembali normal pasca hari raya idul fitri dan tahun baru pada triwulan IV-2006.



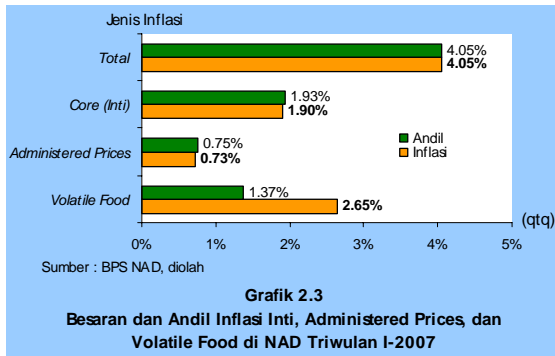
Fluktuasi inflasi bulanan (mtm) selama triwulan I-2007 relatif stabil dengan kecenderungan menurun dimana kenaikan IHK dari bulan Januari sampai Maret 2007 masing-masing sebesar 1,8% (mtm), 1,23% (mtm) dan 0,97% (mtm) (Grafik 2.2). Fenomena ini terjadi terutama dikarenakan penurunan andil inflasi sub-kelompok ikan segar secara drastis dari 1,11% (mtm) menjadi -0,89% (mtm) karena pasokan ikan segar meningkat, dilanjutkan dengan penurunan andil komoditi minyak tanah dari 0,41% (mtm) pada Februari menjadi 0,07% pada bulan Maret. Meskipun demikian fluktuasi inflasi NAD secara bulanan masih lebih volatile diatas rata-rata nasional. Faktor distribusi barang dan jasa masih menjadi pemicu fluktuasi harga tersebut.



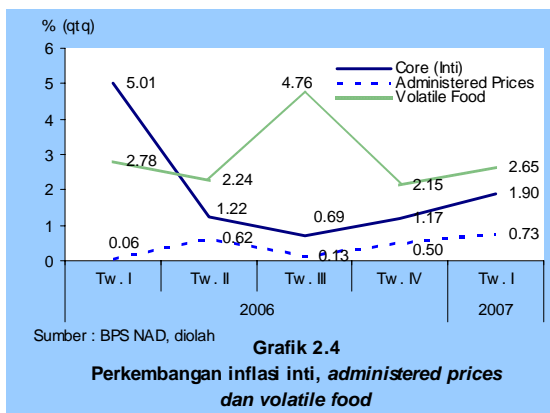
<sup>3</sup> Andil : bobot dari nilai konsumsi suatu komoditi/sub-kelompok/kelompok terhadap total nilai konsumsi dikalikan dengan inflasi komoditi/sub-kelompok/kelompok tersebut.

**Disagregasi Inflasi : Inflasi Inti, Inflasi Volatile Food dan Inflasi Administered Price**

Berdasarkan pembentukan inflasi, inflasi NAD yang sebesar 4,05% (qtq) ternyata paling besar disumbang oleh inflasi inti (core inflation) dengan andil sebesar 1,93% (qtq) atau 47,68% terhadap total inflasi (Grafik 2.3).



Bila dibandingkan triwulan lalu (Grafik 2.4), inflasi inti mengalami peningkatan 73 bp (basis point) menjadi 1,90% (qtq). Secara teoritis, dominasi inflasi inti di NAD menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan dari peningkatan jumlah uang yang beredar sehingga mendorong *demand* masyarakat seiring proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berjalan sampai saat ini.



Inflasi *volatile food* menyumbang dengan andil sebesar 1,37% (qtq) atau 33,79% dalam pembentukan inflasi dengan laju yang meningkat 50 bp bila dibandingkan triwulan lalu menjadi 2,65% (qtq). Terutama komoditi *volatile-food* pada kelompok ikan segar dan kelompok sayur-sayuran.

Sementara itu inflasi *administered prices* sendiri meningkat dari 0,50% (qtq) pada triwulan lalu menjadi 0,73% (qtq). Pendorong inflasi *administered prices* terutama oleh kenaikan harga minyak tanah sebesar 18,81% (qtq).

**C. Inflasi menurut Kelompok Barang dan Jasa**

Secara tahunan (IHK Maret 2007 dibandingkan IHK Maret 2006), kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi di atas 10% (dua digit) terdiri atas kelompok bahan makanan, kelompok perumahan, kelompok sandang, dan kelompok kesehatan (Tabel 2.1). Sedangkan kelompok lainnya hanya 1 digit.

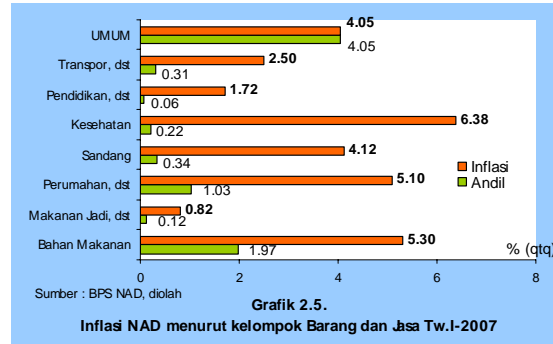
**Tabel 2.1 Inflasi NAD menurut Kelompok Barang & Jasa**

Kelompok	Bulanan (mtm)			Tw. (qtq)	Tahunan (yoy)
	Jan-07	Feb-07	Mar-07		
1 Bahan Makanan	3.71	0.20	1.33	5.30	19.09
2 Makanan Jadi	0.98	-0.11	-0.04	0.82	3.96
3 Perumahan	0.62	2.96	1.45	5.10	13.85
4 Sandang	1.16	1.64	1.26	4.12	14.40
5 Kesehatan	1.05	2.92	2.29	6.38	12.53
6 Pendidikan	0.52	1.20	0.00	1.72	5.16
7 Transpor	0.00	2.49	0.01	2.50	2.60
UMUM	1.80	1.23	0.97	4.0	12.33

Sumber : BPS NAD, diolah

Secara triwulanan, terdapat 3 kelompok yang mengalami inflasi lebih dari 5% yaitu kelompok kesehatan, kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan. Sedangkan kelompok yang berfluktuasi signifikan dari bulan ke bulan (month to month) adalah kelompok bahan makanan. Permasalahan supply dan kontribusi komoditi volatile food pada kelompok ini merupakan penyebab timbulnya fluktuasi tersebut.

Sedangkan kelompok yang mempunyai andil terbesar terhadap pembentukan inflasi di NAD adalah kelompok bahan makanan yaitu 1,97% (qtq) dari inflasi sebesar 4,05% (qtq) atau pangasanya sebesar 48,64% (Grafik 2.5). Upaya untuk mengendalikan laju inflasi di NAD perlu difokuskan pada kelompok yang mempunyai andil dominan seperti kelompok bahan makanan tersebut. Selain kelompok bahan makanan, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar juga perlu dikendalikan karena andilnya juga cukup signifikan yaitu 1,03% (qtq) atau pangsa sebesar 25,43% dari total pembentukan inflasi NAD. Sementara itu, meskipun laju inflasi kelompok kesehatan paling tinggi namun andilnya terhadap pembentukan inflasi NAD relatif rendah, hal ini disebabkan nilai konsumsi barang & jasa pada kelompok ini relatif kecil dibandingkan nilai konsumsi kelompok lainnya.



Menurut komoditi, tabel 2.2 berikut ini menunjukkan 20 komoditi dengan laju inflasi dan andil inflasi yang paling tinggi.

**Tabel 2.2**  
**Komoditas dengan Laju dan Andil Inflasi Triwulanan Terbesar di NAD**  
 Persen (qtq)

No.	Komoditas	Laju	No.	Komoditas	Andil
1	Tomat Buah	98.85	1	Minyak Tanah	0.53
2	Sawi Hijau	89.08	2	Beras	0.43
3	Tomat Sayur	64.51	3	Tomat Sayur	0.30
4	Tiram	50.01	4	Udang Basah	0.29
5	Tarip Sewa Becak	50.00	5	Kembung/Gembung	0.28
6	Daun Singkong	47.37	6	Tarip Sewa Becak Mesin	0.25
7	Kacang Panjang	44.12	7	Pepaya	0.24
8	Bayam	43.49	8	Tongkol	0.23
9	Pepaya	43.10	9	Tukang Bukan Mandor	0.19
10	Pulpen/Bollpoint	38.83	10	Tomat Buah	0.17

Sumber : BPS NAD, diolah

Komoditas dengan laju inflasi terbesar pada triwulan I-2007, sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan yaitu 8 komoditas. Sedangkan 2 komoditas lainnya yaitu tarif sewa becak dan pulpen/ballpoint berasal dari kelompok lainnya. Permasalahan pasokan yaitu distribusi dan faktor musiman diperkirakan menjadi penyebab tingginya laju inflasi komoditas kelompok bahan makanan tersebut. Sedangkan naiknya harga/tarif sewa becak diperkirakan karena penyesuaian harga oleh penarik becak mengingat tingginya kebutuhan

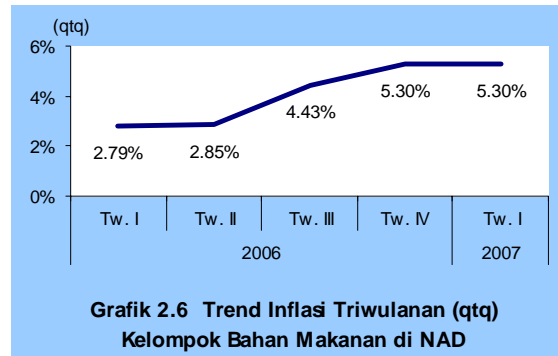
hidup masyarakat NAD saat ini yang diindikasikan oleh UMP (Upah Minimum Provinsi) NAD yang merupakan peringkat kedua tertinggi nasional sesudah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp850 ribu.

Sementara itu, komoditas yang mempunyai andil terbesar terhadap pembentukan inflasi NAD adalah minyak tanah. Kenaikan harga minyak tanah tentunya membebani masyarakat ekonomi lemah yang notabene mayoritas pengguna minyak tanah sebagai bahan bakar masak sehari-hari. Selain itu, inflasi pada komoditas lainnya seperti beras, tomat sayur dan lainnya yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat semakin menurunkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait untuk memperhatikan faktor supply (pasokan) dan distribusi yang sering menjadi penyebab kenaikan harga tersebut.

### 1. Kelompok Bahan Makanan

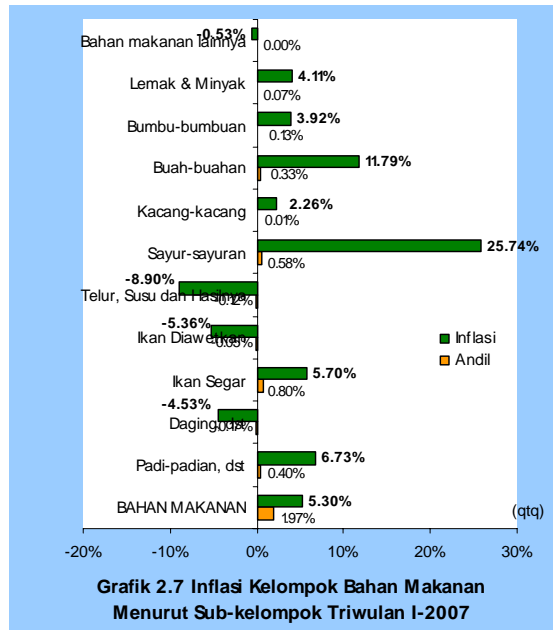
Pengendalian laju inflasi kelompok bahan makanan dapat menstabilkan inflasi NAD secara umum, karena andilnya yang besar terhadap pembentukan inflasi. Pada triwulan I-2007, tampaknya laju inflasi kelompok ini masih cukup tinggi dengan trend tetap bila dibandingkan laju inflasi triwulan lalu (Grafik 2.6). Seharusnya pada triwulan I-2007 terjadi pelambatan laju inflasi, mengingat masuknya musim panen dan juga kembali pulihnya harga-harga pasca Lebaran dan Tahun baru seperti rata-rata nasional. Kenaikan harga komoditas masih terus berlangsung. Tampaknya pasokan yang kurang lancar

adalah penyebab utama trend kenaikan harga kelompok bahan makanan ini mengingat sentra produksi NAD belum mampu memenuhi kebutuhan internal karena sebagian besar masih dipasok dari Medan (Sumatera Utara).



Inflasi kelompok bahan makanan mencapai 5,3% (qtq) dengan andil sebesar 1,97%. Hampir semua sub-kelompoknya mengalami inflasi, kecuali sub-kelompok telur, susu dan hasilnya, sub-kelompok ikan diawetkan dan sub-kelompok daging yang mengalami deflasi pada triwulan I-2007 (Grafik 2.7). Berakhirnya hari raya lebaran menormalkan kembali harga komoditas tersebut yang sebelumnya naik akibat permintaan yang meningkat pada hari raya.

Sementara itu, kenaikan harga pada sub-kelompok ikan segar sebesar 5,70% (qtq) memberikan andil yang besar yaitu 0,80% (qtq) atau pangsa sebesar 40,61% terhadap inflasi kelompok bahan makanan yang sebesar 1,97% (qtq). Kenaikan harga terjadi pada ikan kembung, kerap, mujair dan tiram ikan segar yang disebabkan pasokan yang rendah karena nelayan mengurangi frekuensi melaut karena cuaca yang kurang mendukung.



Sementara itu sub-kelompok sayur-sayuran mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 25,74% (qtq) sehingga andilnya meningkat jadi 0,58% akibat kenaikan harga tomat sayur dan sawi hijau. Pasokan sayur-sayuran di Banda Aceh dan Lhokseumawe sebagian besar berasal dari Berastagi (Sumatera Utara) dan sisanya dari Takengon. Sehingga biaya transportasi menjadi potensi pemicu inflasi apabila jalur distribusi terganggu. Berikutnya adalah sub-kelompok buah-buahan dengan laju inflasi 11,79% (qtq).

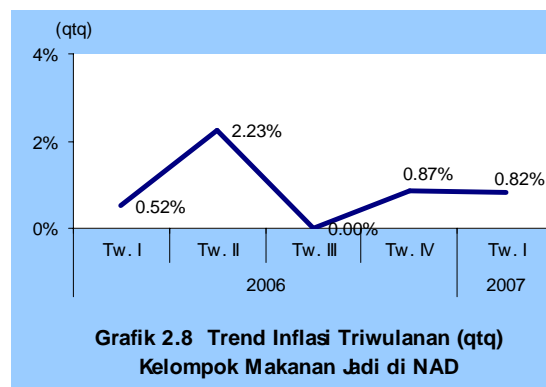
Sedangkan kenaikan harga pada kelompok buah-buahan yang sebesar 11,79% (qtq) disebabkan kenaikan harga tomat buah dan pepaya. Inflasi pada sub-kelompok padi-padian sebesar 6,73% terutama disebabkan kenaikan harga beras, mie basah dan bihun. Sedangkan pada sub-kelompok bumbu-bumbuan, inflasi disebabkan kenaikan harga cabe merah, garam, bawang putih dan penyedap masakan. Kenaikan harga minyak goreng dan kelapa merupakan

penyebab inflasi sub-kelompok lemak dan minyak sebesar 4,11% (qtq). Sedangkan kenaikan harga kacang hijau dan kacang tanah mendorong inflasi sub-kelompok kacang-kacangan sebesar 2,26% (qtq).

Sementara itu, pada sub-kelompok telur, susu dan hasilnya, deflasi sebesar -8,90% (qtq) disebabkan penurunan harga telur ayam ras. Pada sub-kelompok ikan diawetkan, penurunan harga ikan teri mendorong terjadinya deflasi sebesar -5,36% (qtq). Sedangkan pada sub-kelompok daging, deflasi sebesar -4,53% (qtq) disebabkan penurunan harga daging kambing dan sapi setelah sempat melonjak pada triwulan IV-2006 menyambut perayaan lebaran.

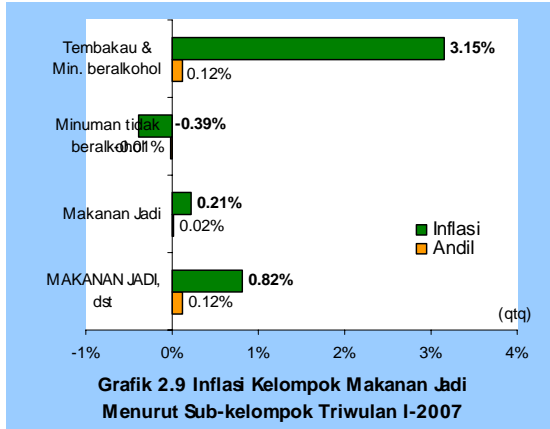
## 2. Kelompok Makanan Jadi

Inflasi kelompok makanan Jadi di NAD mencapai 0,82% (qtq) turun dari 0,87% (qtq). Peningkatan tersebut relatif rendah bila dibandingkan laju inflasi kelompok lain.



Laju inflasi tertinggi pada kelompok makanan jadi, terutama pada sub-kelompok tembakau dan minuman beralkohol sebesar 3,15% (qtq) yang diakibatkan kenaikan harga rokok

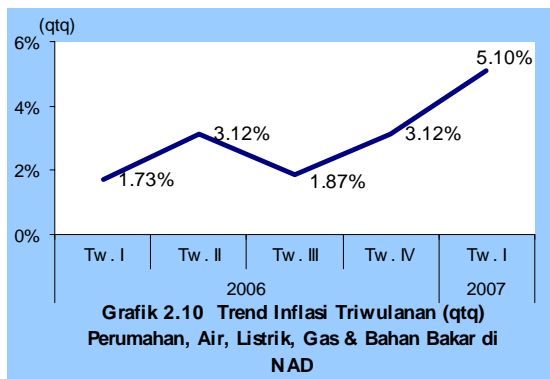
kretek. Sedangkan sub-kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 0,21% (qtq) dengan andil 0,02% akibat kenaikan harga soto. Sedangkan sub-kelompok minuman tidak beralkohol mengalami deflasi 0,39% terutama akibat penurunan harga gula pasir.



Grafik 2.9 Inflasi Kelompok Makanan Jadi Menurut Sub-kelompok Triwulan I-2007

**3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar**

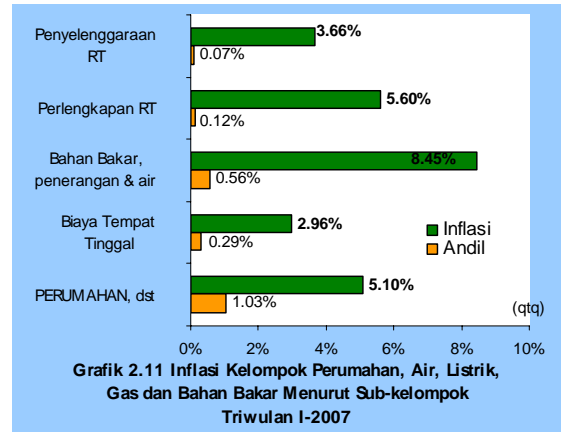
Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar terus meningkat sejak triwulan III-2006 yang sebesar 1,87% menjadi 5,10% (qtq) pada triwulan I-2007.



Grafik 2.10 Trend Inflasi Triwulanan (qtq) Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar di NAD

Laju inflasi tertinggi terutama pada sub-kelompok bahan bakar,

penerangan dan air yaitu sebesar 8,45% (qtq) dengan andil sebesar 0,56%. Seperti telah disebutkan sebelumnya kenaikan ini disumbang oleh kenaikan harga minyak tanah.

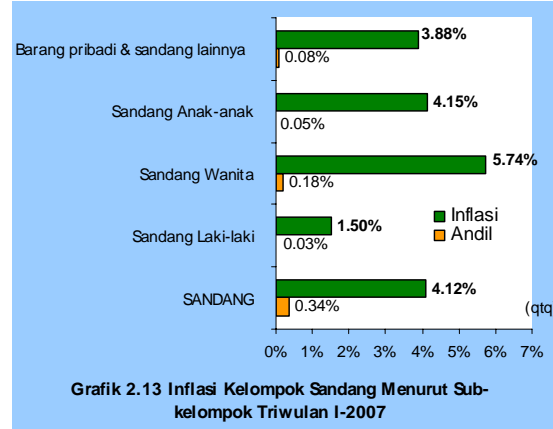
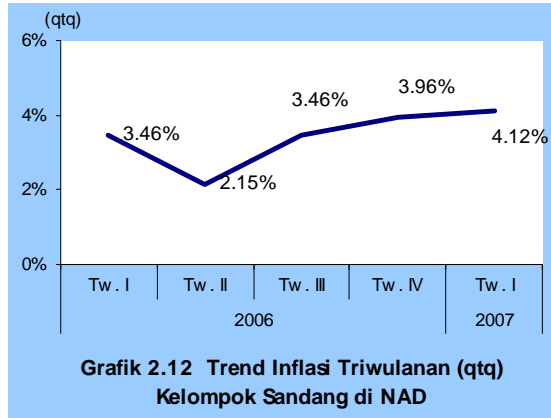


Grafik 2.11 Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Menurut Sub-kelompok Triwulan I-2007

Inflasi tertinggi kedua pada sub-kelompok biaya tempat tinggal sebesar 2,96% (qtq) akibat kenaikan upah tukang bukan mandor. Sedangkan inflasi sub-kelompok perlengkapan RT mencapai 5,60% (qtq) akibat kenaikan harga kain gorden. Sementara itu inflasi sub-kelompok penyelenggaraan RT mencapai 3,66% yang disebabkan kenaikan harga pembasmi nyamuk bakar dan jasa pembuangan sampah.

**4. Kelompok Sandang**

Inflasi kelompok sandang cenderung meningkat sejak triwulan II-2006, dari 2,15% (qtq) menjadi 4,12% (qtq) pada triwulan I-2007.

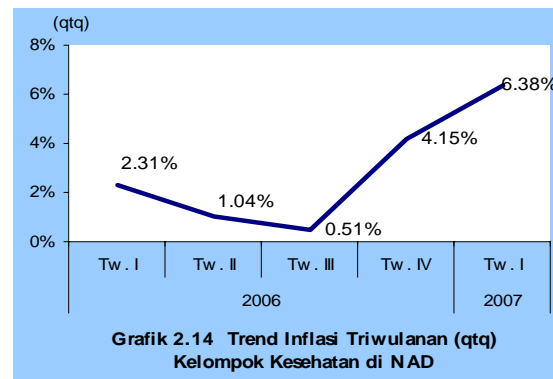


Pada kelompok ini, semua sub-kelompok mengalami inflasi (grafik 2.13). Laju inflasi terbesar terjadi pada kelompok sandang wanita sebesar 5,74% (qtq) dengan andil sebesar 0,18% yang disebabkan kenaikan harga BH katun.

Sub-kelompok barang pribadi dan sandang lainnya meningkat 3,88% (qtq) dengan andil 0,08% yang disebabkan kenaikan harga kerudung/jilbab. Sub-kelompok sandang anak-anak mengalami inflasi sebesar 4,15% (qtq) dengan andil 0,05% terutama akibat kenaikan harga pakaian bayi. Sedangkan sub-kelompok sandang laki-laki mengalami inflasi terendah pada kelompok ini yaitu sebesar 1,50% (qtq) dengan andil 0,03% akibat kenaikan harga celana pendek dan kemeja pendek katun.

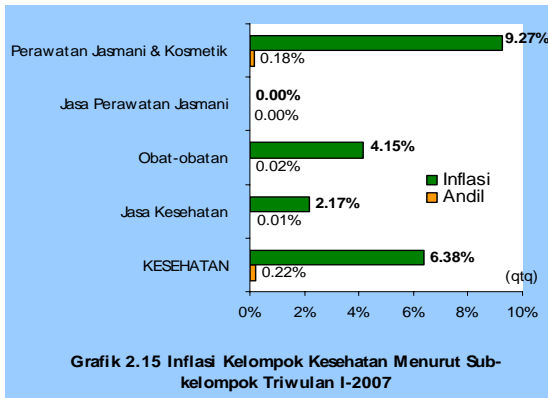
### 5. Kelompok Kesehatan

Inflasi kelompok kesehatan cenderung meningkat dengan slope yang tinggi sejak triwulan III-2006, dari 0,51% (qtq) menjadi 6,38% (qtq) pada triwulan I-2007.



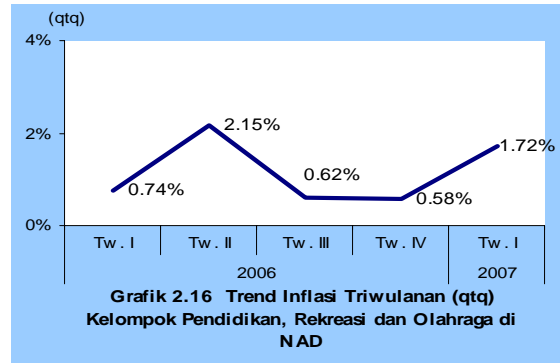
Laju inflasi sub-kelompok perawatan jasmani dan kosmetik

mencapai 9,27% (qtq) dengan andil 0,18%, merupakan sub-kelompok dengan laju dan andil inflasi tertinggi dikelompok ini yang diakibatkan terutama oleh kenaikan harga bedak. Inflasi sub-kelompok obat-obatan mencapai 4,15% dengan andil 0,02% yang disebabkan oleh kenaikan harga balsem gosok. Sub-kelompok jasa kesehatan mengalami inflasi 2,17% (qtq) dengan andil sebesar 0,01% yang disebabkan oleh kenaikan tarif dokter gigi. Sementara itu, sub-kelompok jasa perawatan jasmani tetap (tidak mengalami fluktuasi harga).

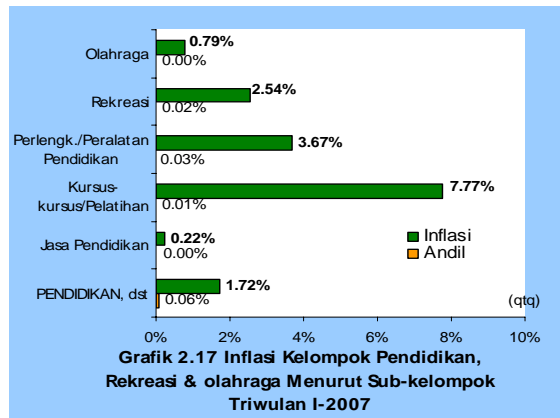


**6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga**

Inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mencapai 1,72% (qtq), terjadi peningkatan dari triwulan sebelumnya. Determinan inflasi kelompok ini adalah sumbangan sub-kelompok perlengkapan dan peralatan pendidikan sebesar 0,03% dengan laju inflasi sebesar 3,67% yang disebabkan kenaikan harga pulpen/ballpoint dan tas sekolah.



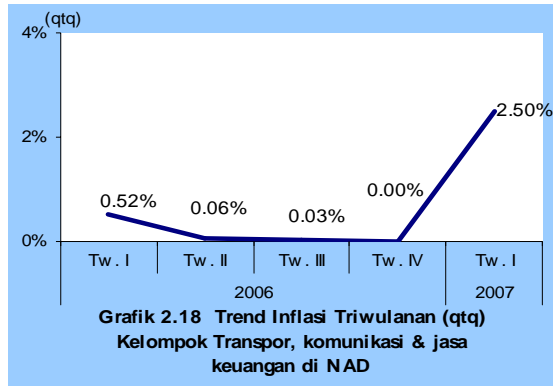
Laju inflasi tertinggi diwakili oleh sub-kelompok kursus/pelatihan sebesar 7,77% (qtq), terutama akibat kenaikan biaya bimbingan belajar dan kursus bahasa asing. Inflasi sub-kelompok rekreasi yang sebesar 2,54% (qtq) terutama akibat kenaikan harga majalah, film dan cuci cetak film. Sementara itu inflasi sub-kelompok olahraga dan jasa pendidikan tidak terlalu besar (dibawah 1%).



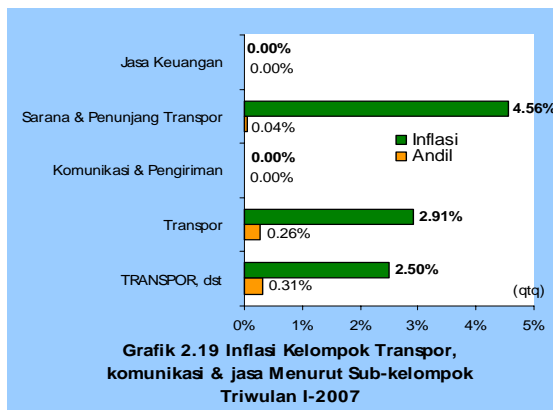
**7. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga**

Pada triwulan I-2007 terjadi inflasi sebesar 2,50% (qtq) pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dari triwulan sebelumnya tidak mengalami inflasi. Inflasi ini disumbang terbesar oleh sub-kelompok transportasi dengan

andil sebesar 0,26% akibat kenaikan tarif sewa becak dan becak mesin.

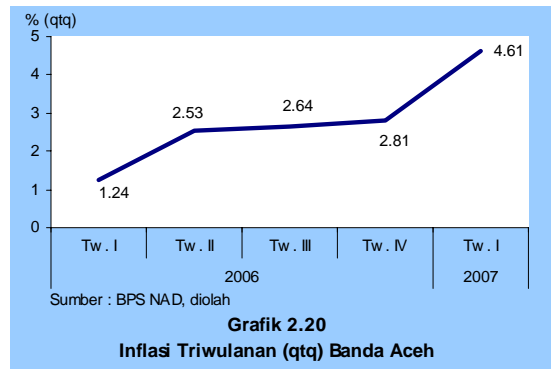


Sedangkan sub-kelompok yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,56% (qtq) adalah sub-kelompok sarana dan penunjang transpor yang terutama diakibatkan oleh kenaikan harga jasa perpanjangan STNK. Sementara itu, sub-kelompok jasa keuangan dan sub-kelompok komunikasi dan pengiriman tidak mengalami kenaikan sama sekali.

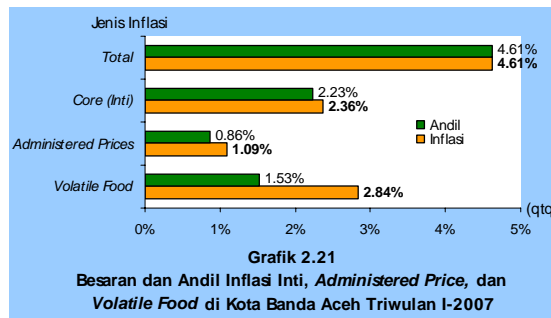


**D. INFLASI KOTA BANDA ACEH**

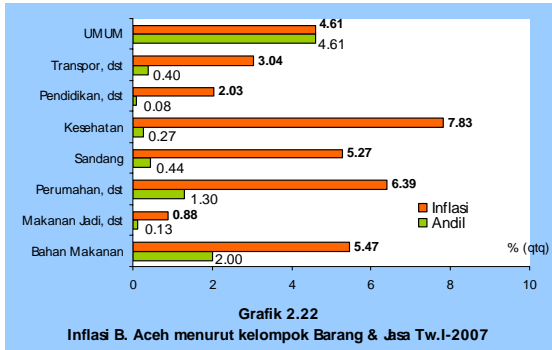
Inflasi di Banda Aceh mencapai 4,61% (qtq), meningkat signifikan dari triwulan sebelumnya yang hanya 2,81% (Grafik 2.20). Sedangkan andilnya sebesar 3,14% atau 77,5% dalam membentuk inflasi NAD.



Inflasi inti di Banda Aceh mencapai 2,36% (qtq) sedangkan andilnya sebesar 2,23% sebagai penyumbang utama inflasi di Banda Aceh. Sementara itu inflasi volatile food yang sebesar 2,84% (qtq) merupakan yang tertinggi dibandingkan inflasi inti dan administered prices. Sedangkan inflasi administered dan andilnya paling rendah.

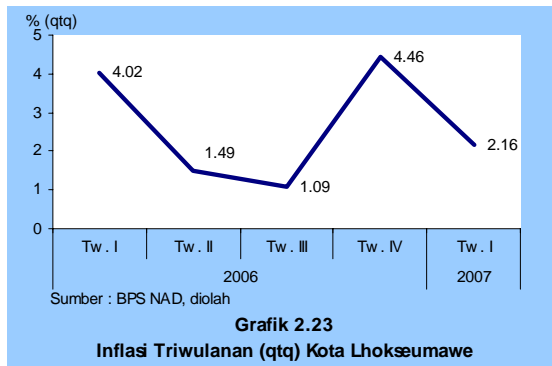


Menurut kelompok barang dan jasa, laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok kesehatan sebesar 7,88% (qtq). Sedangkan yang mempunyai andil terbesar pada pembentukan inflasi Banda Aceh adalah kelompok bahan makanan dengan andil sebesar 2,00% atau berkontribusi sebesar 43,38% inflasi Banda Aceh.



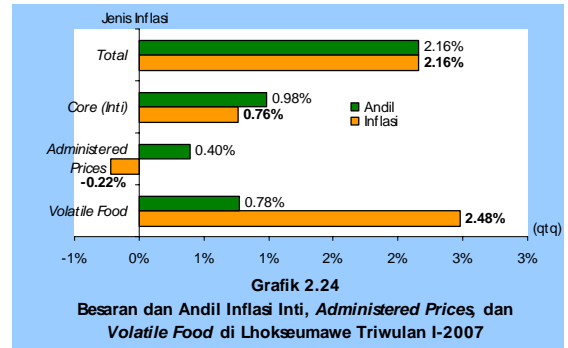
**E. INFLASI KOTA LHOEKSEUMAWE**

Inflasi di Lhokseumawe lebih rendah daripada Banda Aceh, yaitu sebesar 2,16% (qtq), menurun signifikan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 4,46% (Grafik 2.20). Penurunan ini sesuai dengan trend inflasi nasional, dimana laju inflasi melambat setelah berakhirnya perayaan lebaran dan masuknya musim panen yang berlangsung pada triwulan I-2007. Sedangkan andilnya sebesar 0,91% atau 22,5% dalam membentuk inflasi NAD.

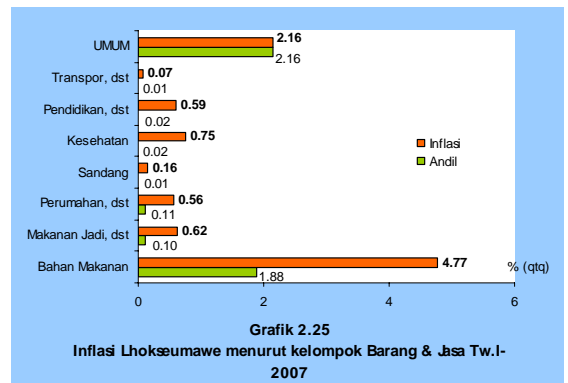


Inflasi inti di Lhokseumawe mencapai 0,76% (qtq) dengan andil sebesar 0,96% merupakan penyumbang dominan pada pembentukan inflasi Lhokseumawe. Sedangkan laju inflasi volatile food sebesar 2,48% (qtq) tertinggi dibandingkan inflasi lainnya dengan andil sebesar 0,78%

(qtq). Sedangkan administered prices sendiri deflasi sebesar -0,22% (qtq) sehingga andilnya hanya sebesar 0,40%.



Menurut kelompok barang dan jasa, laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 4,77% (qtq) dengan andil yang paling dominan yaitu sebesar 1,88% atau berkontribusi 87,04% terhadap pembentukan inflasi Lhokseumawe. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada kelompok sandang yang sebesar 0,16% (qtq).



### BOKS 3 : Sumber Tekanan Inflasi NAD I-2007 (Komoditi Beras)

Inflasi NAD (gabungan kota Banda Aceh dan Lhokseumawe) sampai dengan Februari 2007, mencapai 8,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 6,30% (yoy). Sedangkan selama triwulan I-2007, inflasi bulanan NAD juga masih lebih tinggi dengan inflasi bulanan masing-masing sebesar 1,80% dan 1,23% untuk bulan Januari dan Februari 2007.

#### Perbandingan Inflasi NAD dan Nasional

Wilayah	Inflasi	Desember 2006	2007	
			Januari	Februari
Nasional	YoY	6.60%	6.26%	6.30%
	Monthly	1.21%	1.04%	0.62%
NAD	YoY	9.97%	9.54%	8.82%
	Monthly	2.12%	1.80%	1.23%

Inflasi tahunan untuk february 2007 paling besar disumbang oleh kelompok bahan makanan yaitu sebesar 3,34% (yoy) dari 8,82% (yoy) atau menyumbang 37,9% dari total inflasi NAD.

#### Sumbangan Inflasi (yoy) menurut kelompok Barang dan Jasa

NO	Kelompok Barang & Jasa	Februari 2007	
		Perubahan harga	Sumbangan thd inflasi
1	<b>Bahan makanan</b>	<b>9.92%</b>	<b>3.34%</b>
2	Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau	4.36%	1.31%
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bhn bakar	13.45%	1.76%
4	Sandang	12.90%	0.72%
5	Kesehatan	9.46%	0.30%
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	5.02%	0.32%
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	2.45%	1.06%
	<b>Umum</b>	<b>8.82%</b>	

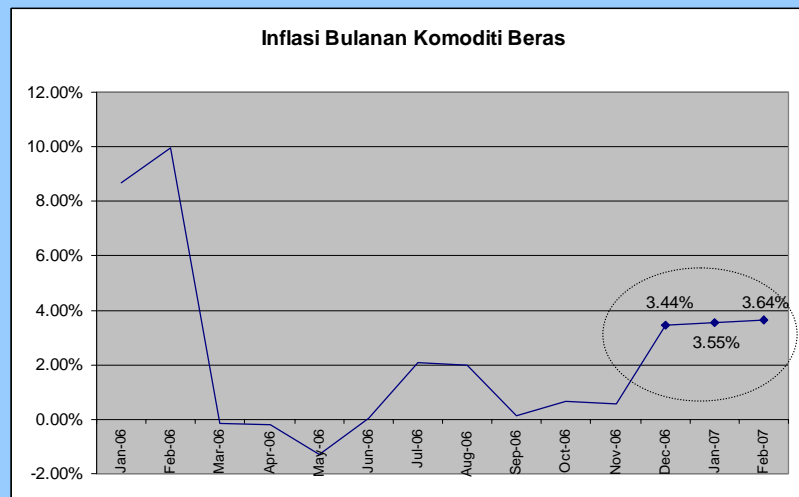
Sedangkan menurut komoditi, sumbangan terbesar terhadap inflasi berasal dari komoditi beras yaitu sebesar 0.50% (yoy).

#### 10 Komoditi Penyumbang Terbesar Inflasi Februari 2007 (yoy)

Peringkat	Komoditi	Sumbangan	Peringkat	Komoditi	Sumbangan
1	<b>Beras</b>	<b>0.50%</b>	6	Tarif Telepon	0.26%
2	Tongkol	0.49%	7	Minyak Tanah	0.25%
3	Bensin	0.49%	8	Udang basah	0.22%
4	Angkutan dalam kota	0.39%	9	Sewa rumah	0.21%
5	Kontrak Rumah	0.31%	10	Tarif sewa becak mesin	0.19%

### **Inflasi Komoditi Beras**

Selama triwulan I-2007 (Januari dan Februari), harga beras mengalami kenaikan yang relatif tinggi bila dibandingkan kenaikan bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan ini dimulai pada bulan Desember 2006 lalu, yaitu sebesar 3,44% (mtm), kemudian meningkat menjadi 3,55% (mtm) pada Januari 2007 dan terus meningkat mencapai 3,64% (mtm) pada Februari 2007.



### **Perkembangan Harga Beras**

Harga jual beras lokal di pasar Banda Aceh mengalami kenaikan dari Rp 4.800/kg menjadi Rp 5.000/kg untuk beras standar, bahkan di Lhokseumawe mencapai Rp 86.000 per zak atau Rp 5.733,3/kg. Beras dari Medan (yang ditengarai beras blang bintang/lokal) di jual di Aceh pada harga Rp 95.000/zak atau Rp 6.333,3/kg. Sedangkan untuk beras bulog harga masih relatif rendah yaitu sekitar Rp 3.700/kg.

### **Faktor-faktor penyebab inflasi beras**

Inflasi yang terjadi pada komoditi beras ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain :

- a. Permintaan masyarakat yang meningkat untuk menyambut Idul Adha yang diiringi tradisi Meugang (tradisi pesta makan daging yang banyak diselenggarakan oleh masyarakat). Sehingga permintaan kebutuhan di Aceh relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang hanya menyelenggarakan Idul Adha saja. Selain itu, banjir besar yang melanda Aceh Tamiang dan Aceh timur, juga mendorong permintaan beras untuk memenuhi kebutuhan pengungsi korban banjir tersebut.

- b. Pasokan beras yang menipis akibat gagal panen yang terjadi di beberapa daerah yang terkena banjir besar, selain itu saat ini petani sudah memasuki musim tanam.
- c. Kenaikan harga tebus gabah yang sebelumnya hanya sekitar Rp 2.150/kg naik mencapai kisaran Rp 2.750/kg - Rp 2.800/kg. Bahkan harga yang ditawarkan dari tauke/pedagang Medan lebih tinggi lagi yaitu mencapai Rp 2.900/kg - Rp 3.000/kg.
- d. Meningkatnya biaya angkut beras Aceh-Medan-Aceh akibat terputusnya jalur transportasi di Aceh Tamiang yang dilanda banjir besar pada akhir Desember 2006 lalu. Ongkos angkut yang biasanya sebesar Rp150/kg naik menjadi Rp.200/kg.

Tingginya harga beras di Provinsi NAD disebabkan oleh Biaya transportasi yang relatif lebih tinggi, yaitu akumulasi biaya transportasi gabah dari sentra produksi padi seperti (Pidie, Aceh Utara, dan daerah lainnya) ke Medan, dan biaya transportasi beras yang sudah digiling dari kilang penggilingan Medan kembali ke Aceh. Sebagian besar gabah petani Aceh di jual kepada tauke Medan karena pertimbangan harga tebus gabah yang relatif lebih tinggi (Rp.2900 - Rp.3000) dan keterbatasan kilang penggilingan yang representatif di Aceh. (Sampai saat ini, menurut Dinas Pertanian NAD, kilang penggilingan padi yang representatif hanya 1 yang terletak di Kabupaten Pidie).

#### **Kebijakan Pemprov. NAD**

Untuk mengatasi kenaikan harga beras tersebut, pemerintah provinsi NAD melalui Bulog Divre NAD melakukan beberapa kali OPM beras dibanyak titik di Banda Aceh dan Aceh Besar. Pelaksanaan OPM biasanya dilaksanakan oleh Bulog tiap kabupaten setelah mendapat instruksi dari Bupati/walikota.

#### **Pemetaan produksi pertanian (beras)**

Menurut data perkiraan produksi padi tahun 2006 (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov NAD), mencapai 1,3 juta ton lebih atau setara dengan 852,8 ribu ton beras, sedangkan jumlah beras yang dikonsumsi termasuk untuk pakan, benih, buffer stock (cadangan) dan susut tahun yang sama hanya 684.757 ton. Jadi sebenarnya terjadi surplus sebanyak 168.017 ton.

Sedangkan untuk tahun 2007, ditargetkan produksi padi sebesar 1,47 juta ton padi (dengan bantuan tambahan benih padi gratis dari pemerintah pusat sebesar 4.275 ton) dengan luas lahan lebih dari 350 ribu hektar.

### Data Produksi Padi Provinsi NAD

KOMODITI PADI		TAHUN				
		2001	2002	2003	2004	2005
SAWAH	Luas Panen (ha)	293,049	311,062	364,943	367,537	334,049
	Produksi (ton)	1,242,373	1,305,401	1,541,506	1,554,528	1,403,141
	Produktivitas (ton/ha)	4.24	4.20	4.22	4.23	4.20
LADANG	Luas Panen (ha)	1,889	4,069	2,693	3,431	3,844
	Produksi (ton)	4,239	8,764	5,993	7,555	8,508
	Produktivitas (ton/ha)	2.24	2.15	2.23	2.20	2.21
TOTAL	Luas Panen (ha)	294,938	315,131	367,636	370,968	337,893
	Produksi (ton)	1,246,612	1,314,165	1,547,499	1,562,083	1,411,649
	Produktivitas (ton/ha)	4.23	4.17	4.21	4.21	4.18

Sumber : Aceh Dalam Angka 2005 - BPS NAD, diolah

#### Rekomendasi

Mengingat kebutuhan akan beras bersifat inelastis (masyarakat tetap mengkonsumsi beras pada harga berapapun), maka upaya untuk menstabilkan harga beras hanya dapat dipengaruhi pada sisi supply saja. Kecuali masyarakat mau mensubstitusi komoditi beras (beras non-bulog) dengan beras bulog yang harganya relatif murah dan stabil.

Untuk menjamin supply beras dalam jumlah yang cukup dan harga yang relatif murah, maka perlu dibuat kilang penggilingan padi yang representatif dalam jumlah yang cukup di beberapa sentra produksi beras Aceh, sehingga gabah tidak perlu dikirim ke Medan terlebih dahulu hanya untuk digiling, untuk selanjutnya dijual kembali ke NAD dengan harga yang relatif lebih mahal karena dibebani biaya angkut yang mahal, dan rawan terhadap gejolak harga apabila jalur transportasi Banda Aceh-Medan terganggu.

Selain itu Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Dati II harus lebih responsif untuk segera menginstruksikan Bulog untuk melakukan OPM beras, ketika harga beras dipasaran bergejolak.

## BAB III

### PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja perbankan NAD sampai dengan triwulan I-2007 secara umum masih positif meski beberapa indikator mengalami penurunan. Dalam hal ekspansi jaringan, Perbankan NAD menunjukkan kinerja yang menggembarakan yaitu dengan bertambahnya jumlah kantor Bank dan ATM sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Total aset Bank Umum (konvensional dan syariah) mengalami penurunan sebesar 8,34% (qtq) menjadi Rp25,01 triliun. Penurunan DPK yang sebesar 5,68% (qtq) menjadi Rp19,9 triliun, terutama penurunan pada simpanan giro menjadi penyebab utama penurunan total aset. Penurunan DPK terutama simpanan Giro pada awal tahun sudah menjadi pola perbankan NAD. Hal ini tampaknya terkait dengan peningkatan transaksi pembayaran giral baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun swasta. Meskipun demikian, penurunan DPK tidak menghambat Bank Umum untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Kredit tumbuh 7,7% (qtq) menjadi Rp4,91 triliun dengan peruntukkan terbesar masih pada kredit konsumsi sebesar 60,3% dari total kredit. Sedangkan menurut sektor ekonomi, penyaluran kredit terbesar pada sektor perdagangan, restoran dan hotel baik yang diberikan oleh Bank Umum Konvensional maupun Syariah.

Sementara itu kinerja Bank Perkreditan Rakyat di NAD secara umum

positif. Indikator keuangan seperti total aset, DPK dan Kredit mengalami peningkatan. Namun kualitas kredit yang disalurkan memburuk yang tercermin pada kenaikan NPL dari 20,20% di triwulan IV-2006 melonjak tajam menjadi 38,76% pada triwulan I-2007 menjadi masalah penting yang harus diperhatikan.

Pada sistem pembayaran, kebutuhan uang kartal diperkirakan mengalami penurunan yang diindikasikan oleh penurunan outflow di KBI Banda Aceh. Sedangkan transaksi pembayaran non tunai khususnya melalui sistem kliring mengalami peningkatan dari segi nominal namun menurun dari segi volume transaksinya. Sementara itu jumlah uang palsu diperkirakan meningkat, yang ditunjukkan peningkatan jumlah temuan uang palsu oleh KBI Banda Aceh.

#### **A. Bank Umum**

Total aset Bank Umum pada triwulan I-2007 mengalami penurunan sebesar Rp2,28 triliun atau -8,34% (qtq) menjadi Rp25,01 triliun. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi penurunan DPK sebesar Rp1,2 triliun atau -5,68% (qtq) menjadi Rp19,9 triliun. Sedangkan penyaluran kredit terjadi peningkatan sebesar Rp351 miliar atau 7,7% (qtq) menjadi Rp4,91 triliun. Hal tersebut menyebabkan rasio LDR membaik dari 21,62% menjadi 24,68%. Namun disisi

lain jumlah kredit bermasalah sedikit meningkat yang tercermin dari rasio NPL sebesar 1,58% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,12% (qtq).

**1. Perkembangan Jaringan Kantor**

Sampai dengan triwulan I-2007, di NAD terdapat 38 Bank yang terdiri atas 12 Bank Umum Konvensional, 6 Bank Umum Syariah/ Unit Usaha Syariah, 15 BPR Konvensional dan 5 BPR Syariah (Tabel 3.1).

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Bank dan Kantor Bank di NAD**  
**Triwulan I-2007**

BANK	Jml Bank	KP	KC	KCP	KK	KU	Jml Kantor
Bank Umum Konvensional	12	1	43	29	34	116	223
Bank Umum Syariah/US	6	0	4	0	2	0	6
BPR Konv.	15	15	0	0	2	0	17
BPR Syariah	5	5	0	0	0	0	5
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>38</b>	<b>116</b>	<b>251</b>

Keterangan :  
 KP : Kantor Pusat  
 KC : Kantor Cabang  
 KCP : Kantor Cabang Pembantu  
 KK : Kantor Kas  
 KU : Kantor Unit

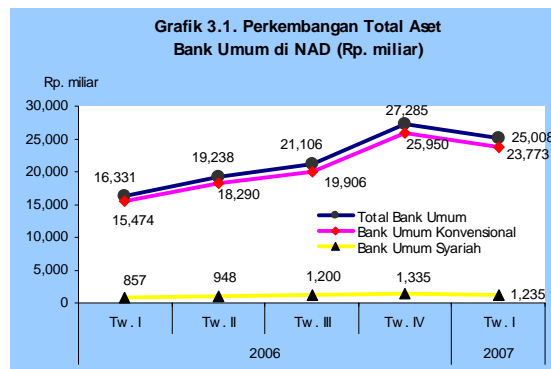
Sedangkan menurut jumlah kantor bank, saat ini terdapat 251 Kantor Bank, yang terdiri atas 223 Kantor Bank Umum Konvensional, 6 Kantor Bank Umum Syariah, 17 Kantor BPR Konvensional dan 5 Kantor BPR Syariah.

Pada triwulan I-2007 (Januari - Maret 2007) terdapat penambahan 1 KC, 2 KCP, 4 KK, dan 2 KU serta 9 ATM. Selain itu juga terdapat peningkatan status kantor, yaitu 1 peningkatan KCP menjadi KC, dan 1 peningkatan KK menjadi KCP. Perkembangan tersebut menunjukkan iklim usaha di NAD

khususnya perbankan makin kondusif dan prospektif.

**2. Perkembangan Aset Bank Umum**

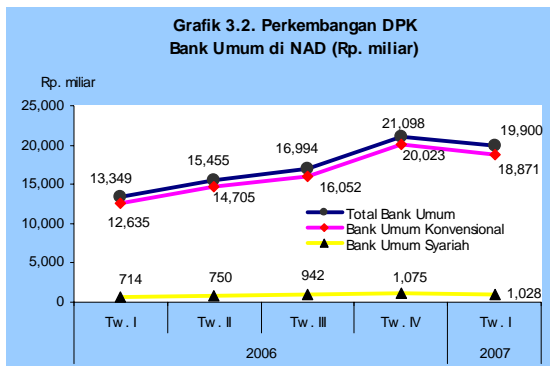
Berdasarkan total aset, Bank Umum Konvensional (BUK) masih mendominasi sebesar 95,1% dari total aset Bank Umum di NAD. Pada triwulan I-2007, total aset BUK turun dari Rp25,95 triliun menjadi Rp23,78 triliun (grafik 3.1). Sedangkan Bank Umum Syariah (BUS) juga mengalami penurunan aset dari Rp1,33 triliun menjadi Rp1,23 triliun. Penurunan aset tersebut salah satunya disebabkan oleh penurunan simpanan Dana Pihak Ketiga, baik pada BUK maupun BUS. Penurunan aset tersebut wajar bila kita bandingkan dengan pola trend periode yang sama tahun sebelumnya, dimana aset mengalami penurunan di awal tahun (triwulan I) contohnya penurunan aset dari Rp16,53 triliun pada triwulan IV-2005 menjadi Rp16,33 triliun I-2006. Demikian pula, pola pada triwulan IV-2004 ke triwulan I-2005.



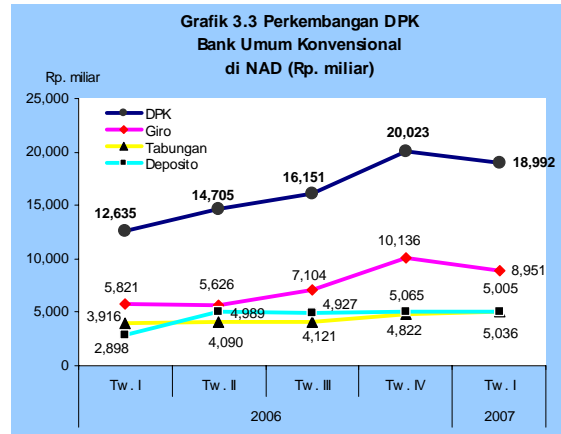
**3. Perkembangan DPK Bank Umum**

Dalam hal penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BUK juga mendominasi sebesar 94,8% dari total DPK Bank Umum. Menurut pertumbuhannya, DPK

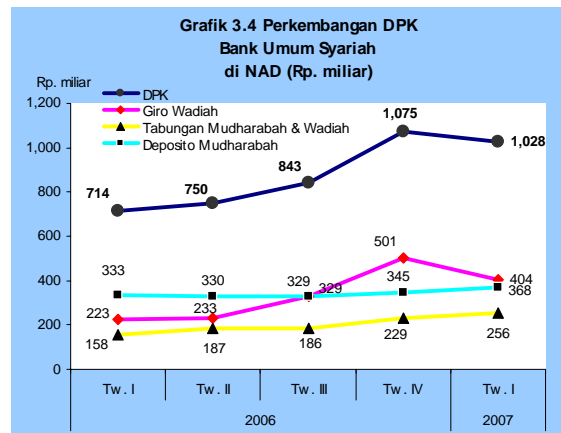
Bank Umum keseluruhan mengalami penurunan dari Rp21,1 triliun menjadi Rp19,9 triliun atau sebesar -5,67% (qtq). Penurunan terjadi baik pada DPK BUK maupun BUS, dimana DPK BUK mengalami penurunan dari Rp20 triliun menjadi Rp18,87 triliun. Sedangkan BUS juga turun dari Rp1,08 triliun menjadi Rp1,03 triliun. Penurunan tersebut terutama terjadi pada simpanan Giro baik di BUK maupun BUS. Peningkatan pembayaran transaksi usaha melalui pembayaran giral baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta di awal tahun 2007 tampaknya menjadi penyebabnya seperti awal tahun 2006 (triwulan I-2006) yang lalu dimana simpanan giro Bank Umum juga mengalami penurunan dari Rp6,86 triliun (triwulan IV-2005) menjadi Rp5,82 triliun.



Penurunan DPK BUK terutama terjadi pada simpanan Giro yang turun sebesar Rp1,18 triliun menjadi Rp8,95 triliun (grafik 3.2). Hal yang sama juga terjadi pada simpanan deposito yang turun dari Rp5,06 triliun menjadi Rp5,04 triliun. Sedangkan simpanan tabungan tetap meningkat 3,94% (qtq) dari Rp4,82 triliun menjadi Rp5,01 triliun.

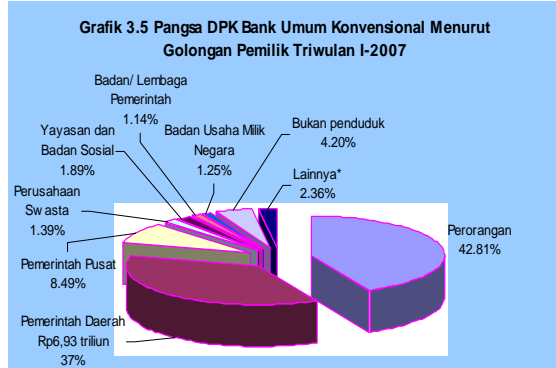


Penurunan DPK BUS terutama terjadi pada simpanan Giro Wadiah yang turun sebesar Rp97 miliar menjadi Rp404 miliar (grafik 3.3). Sedangkan simpanan tabungan (mudharabah dan wadiah) dan deposito (mudharabah) tetap meningkat masing-masing menjadi Rp256 miliar dan Rp368 miliar.



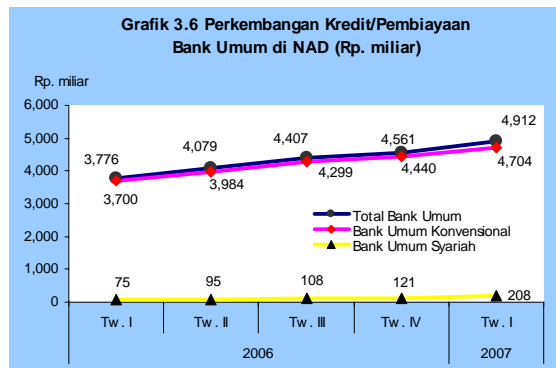
Berdasarkan kepemilikannya, Dana Pihak Ketiga terutama dikuasai oleh perorangan sebesar 42,81% dari total DPK atau senilai Rp8,13 triliun dalam bentuk tabungan sebesar Rp4,73 triliun, giro sebesar Rp2,24 triliun dan deposito sebesar Rp1,17 triliun. Sedangkan, Pemerintah Daerah menguasai 37% Total DPK atau senilai

Rp6,93 triliun dengan jumlah terbanyak pada giro sebesar Rp3,82 triliun, deposito Rp3,08 triliun dan tabungan sebesar Rp26,28 miliar.

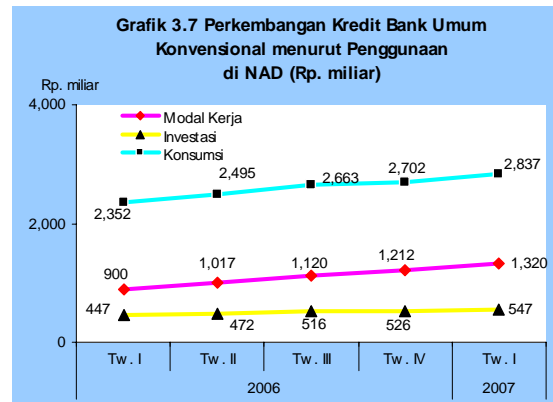


**4. Perkembangan Kredit Bank Umum**

Penyaluran kredit yang dilakukan Bank Umum meningkat 7,7% (qtq) dari Rp4,56 triliun menjadi Rp4,91 triliun. Peningkatan terjadi pada BUK maupun BUS. Penyaluran kredit oleh BUK meningkat sebesar 5,95% (qtq) dari Rp4,4 triliun menjadi Rp4,7 triliun sedangkan BUS meningkatkan pembiayaan sebesar 12,8% (qtq) dari Rp121 miliar menjadi Rp208 miliar.

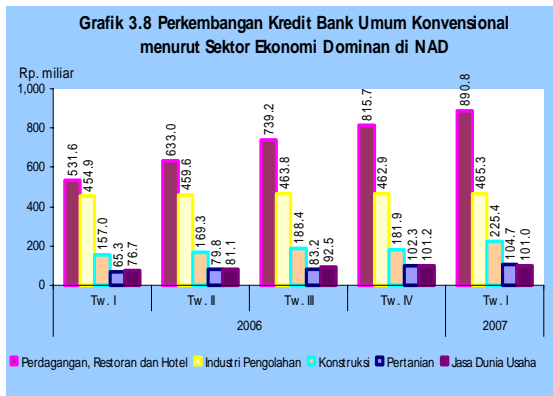


Penyaluran kredit oleh BUK meningkat untuk semua jenis penggunaan baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Menurut persen pertumbuhan, kredit modal kerja tumbuh paling tinggi yaitu 8,88% (qtq) sedangkan kredit investasi dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 4% dan 5%. Sedangkan menurut nominal pertumbuhan, kredit konsumsi mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu meningkat sebesar Rp140 miliar dari Rp2,7 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp2,84 triliun. Sedangkan kredit modal kerja hanya tumbuh Rp108 miliar menjadi Rp1,32 triliun. Sementara kredit investasi hanya tumbuh Rp21 miliar menjadi Rp547 miliar. Menurut komposisinya, kredit konsumsi masih mendominasi sebesar 60,3%, sedangkan pangsa kredit investasi dan modal kerja masing-masing sebesar 11,6% dan 28,1%.



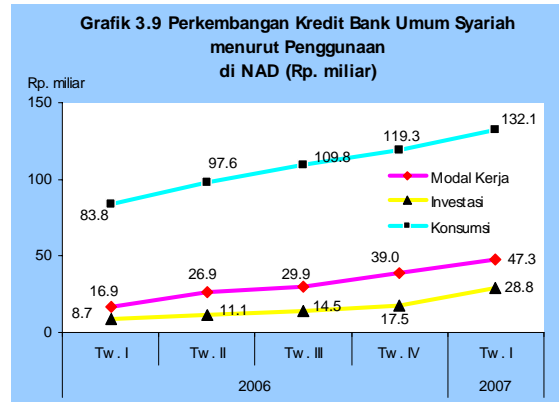
Menurut sektor ekonomi, penyaluran kredit BUK sebagian besar masih diperuntukkan pada sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan nominal sebesar Rp891 miliar, diikuti sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertanian

dan sektor jasa dunia usaha. Pertumbuhan tertinggi baik secara nominal maupun persentase terjadi pada kredit untuk sektor konstruksi seiring proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD yang masih berlangsung. Pada triwulan ini, kredit sektor konstruksi meningkat sebesar Rp75 miliar atau 23,9% (qtq) menjadi Rp225,4 miliar.



Sama seperti BUK, pembiayaan yang dilakukan BUS juga mengalami peningkatan yang lebih signifikan. Secara persentase pertumbuhan BUS relatif lebih tinggi dibandingkan BUK. Pembiayaan untuk konsumsi (piutang) juga mendominasi seperti halnya pada BUK, yaitu mencapai 63,5% sedangkan pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing sebesar 22,7% dan 13,8%. Pertumbuhan secara nominal paling besar terlihat pada pembiayaan konsumsi yang meningkat Rp12,85 miliar menjadi Rp132,12 miliar pada triwulan I-2007. Sedangkan modal kerja tumbuh sebesar Rp8,26 miliar menjadi Rp47,27 miliar dan investasi tumbuh sebesar Rp11,22 miliar menjadi Rp28,77 miliar. Sedangkan menurut persen pertumbuhannya, pembiayaan investasi tumbuh signifikan sebesar

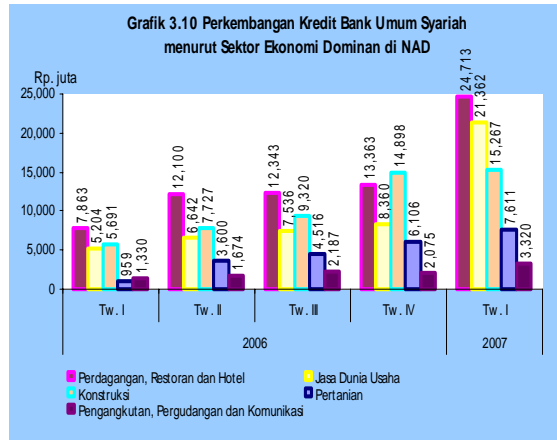
63,9% (qtq), sehingga mengurangi dominasi pembiayaan konsumtif yang pada triwulan sebelumnya mencapai 67,8% turun menjadi 63,5% terhadap total pembiayaan yang dilakukan oleh BUS.



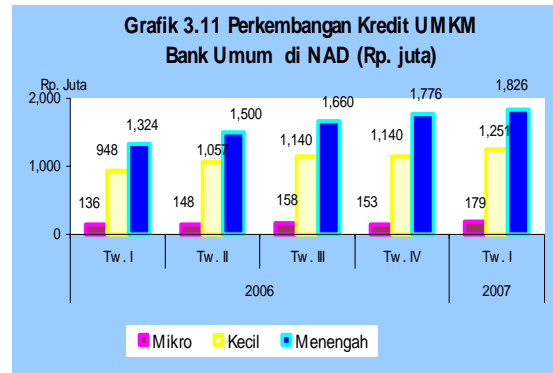
Menurut sektor ekonomi yang dibiayai (diluar sektor lainnya), sektor perdagangan, restoran dan hotel mendominasi sebesar 11,9% dari total pembiayaan yang disalurkan BUS. Selanjutnya sektor jasa dunia usaha menguasai pembiayaan BUS sebesar 10,3% dan diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 7,3%. Sementara itu sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian di NAD setelah migas hanya mendapat pembiayaan sebesar 3,7%.

Menurut pertumbuhannya baik secara nominal maupun persentase, pembiayaan sektor jasa dunia usaha tumbuh paling pesat, yaitu meningkat sebesar Rp9,58 miliar atau 155,5% (qtq) seiring maraknya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta kondisi keamanan yang makin pulih tentunya membutuhkan jasa seperti perbengkelan pendidikan, perbengkelan, komunikasi audio-visual, dan lainnya dimana pada masa

konflik sulit untuk dikembangkan. Ini memberikan sinyal positif bagi dunia usaha, bahwa provinsi NAD mulai kondusif bagi iklim usaha minimal di mata pengusaha lokal.



hanya 6,1% (qtq) atau meningkat Rp188 miliar, sedangkan kredit non-UMKM (nominal lebih besar dari Rp5 miliar) tumbuh sebesar 10,9% (qtq).



**5. Perkembangan Kredit MKM (Mikro, Kecil dan Menengah) Bank Umum**

Sebagian besar kredit yang disalurkan Bank Umum di NAD tergolong dalam kredit MKM<sup>1</sup> yaitu sebesar 66,3% atau senilai Rp3,26 triliun dari total kredit yang sebesar Rp4,91 triliun (grafik 3.11). Bila dilihat pertumbuhannya, laju pertumbuhan kredit UMKM relatif rendah yaitu

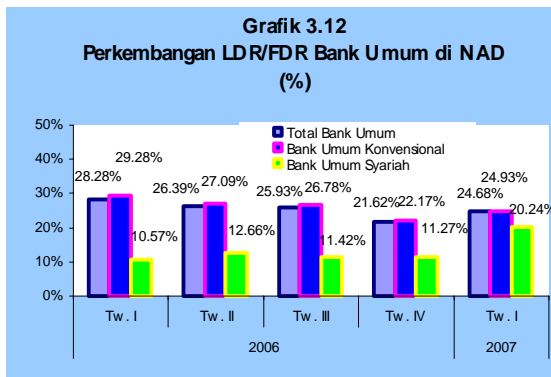
Komposisi kredit UMKM pada triwulan I-2007 terdiri atas kredit mikro sebesar Rp179 miliar (28% dari total kredit UMKM), kredit kecil sebesar Rp1,25 triliun dengan pangsa 12% dan kredit menengah sebesar Rp1,83 triliun dengan pangsa 60%. Masih rendahnya usaha mikro dan kecil terhadap akses kredit Bank Umum tampaknya disebabkan oleh masalah persyaratan administrasi (seperti laporan keuangan) dan agunan yang belum bisa dipenuhi dengan baik oleh usaha skala mikro dan kecil tersebut. Oleh karena itu usaha untuk peningkatan *capacity building* diperlukan untuk mewujudkan usaha yang *bankable*. Selain itu, bank sendiri belum banyak mengenal profil-profil calon debitur berpotensi, karena rata-rata usaha skala mikro dan kecil di NAD diperkirakan baru berumur kurang lebih 2 tahun (pasca tsunami tahun 2004), sehingga aspek *character* sebagai salah satu dari aspek (5C) yang menjadi tolok ukur Bank dalam memberikan kredit pada

<sup>1</sup> Kredit UMKM adalah yang diklasifikasikan sebagai berikut :  
 Mikro → 0 s.d. Rp50 juta,  
 Kecil → Rp50juta s.d. juta,  
 Menengah → Rp500juta s.d. Rp5 miliar

calon debitur belum dapat dilakukan *assesment* dengan baik.

**6. Intermediasi Bank Umum**

Secara umum, kinerja intermediasi yang dilakukan oleh Bank Umum NAD meningkat yang tercermin pada peningkatan LDR/FDR (Loan/Finance to Deposit Ratio) baik pada BU Konvensional maupun BU Syariah. Sampai dengan triwulan I-2007, rasio LDR<sup>2</sup> Bank Umum meningkat 306 bps (qtq) dari 21,62% menjadi 24,93%. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyaluran kredit sebesar 7,7% (qtq) disertai penurunan DPK sebesar -5,67% (qtq). Meskipun demikian, LDR pada triwulan I-2007 masih lebih rendah bila dibandingkan dengan LDR pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 28,28%. Hal ini disebutkan laju peningkatan jumlah DPK yang signifikan tidak diimbangi oleh laju penyaluran kredit



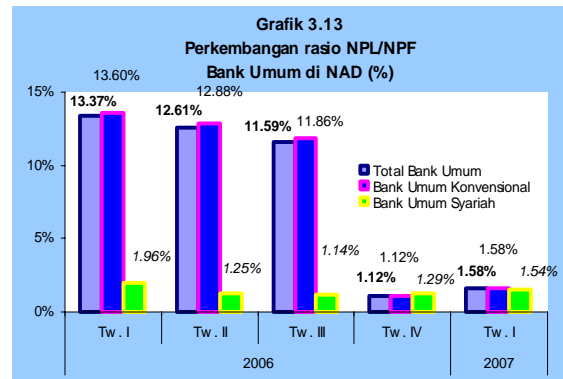
Sementara itu, LDR BU Konvensional meningkat dari 21,62% menjadi 24,93%. Sedangkan FDR (Finance to Deposit Ratio) BU Syariah mengalami peningkatan yang signifikan

<sup>2</sup> LDR (Loan to Deposit Ratio) adalah perbandingan nominal kredit yang disalurkan terhadap Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, Deposito) yang dihimpun.

sebesar 897 bps dari 11,27% menjadi 20,24%. Peningkatan yang signifikan pada FDR BU Syariah juga disebabkan oleh peningkatan penyaluran pembiayaan yang signifikan sebesar 12,8% (qtq) disertai penurunan jumlah DPK sebesar 4,64% (qtq).

**7. Kualitas Kredit Bank Umum**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penyaluran kredit mengalami peningkatan, meskipun demikian hal ini diikuti oleh peningkatan rasio kredit non-lancar terhadap total kredit (NPL)<sup>3</sup>. Rasio NPL/NPF (Non Performing Loan/Finance) Bank Umum mengalami peningkatan dari 1,12% di triwulan IV-2006 menjadi 1,54% pada triwulan I-2007. Meskipun demikian, kualitas kredit tersebut masih dibawah batas yang diharapkan (maksimal 5%).



Rasio NPL BU Konvensional mencapai 1,58% lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio NPF BU Syariah yang sebesar 1,54%.

**B. Bank Perkreditan Rakyat**

Bila dibandingkan triwulan IV-2006, kinerja BPR maupun BPRS di NAD

<sup>3</sup> Kredit non lancar adalah kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet

pada triwulan I-2007 secara umum mengalami penurunan yaitu dalam hal intermediasi maupun kualitas kredit yang disalurkan. LDR/FDR mengalami penurunan dari 89,60% menjadi 85,76%. Penurunan indikator intermediasi disebabkan oleh peningkatan penyaluran kredit yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penghimpunan DPK. Penyaluran kredit pada triwulan I-2007 mencapai Rp40,02 miliar mengalami pertumbuhan relatif kecil yaitu 2,57% (qtq) dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp39,01 miliar. Sedangkan penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan lebih tinggi yaitu sebesar 7,17% (qtq) dari Rp43,54 miliar menjadi Rp46,66 miliar.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Pokok BPR/S NAD**

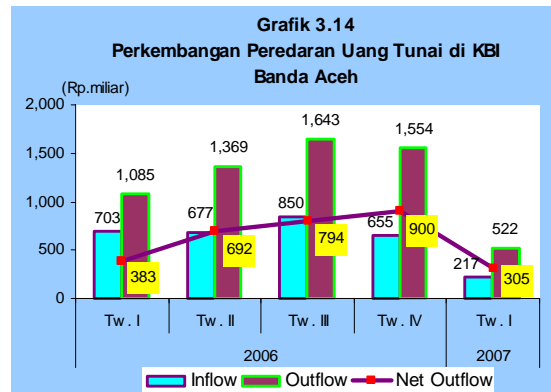
Indikator Pokok	2006				2007
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I
<b>Total Aset</b>	70,825	55,533	60,885	61,788	67,999
Konvensional	48,062	31,679	36,310	37,555	40,784
Syariah	22,763	23,854	24,575	24,233	27,215
<b>DPK</b>	40,831	41,165	44,071	43,542	46,662
Konvensional	23,968	22,729	23,848	25,962	27,595
Syariah	16,863	18,435	20,223	17,580	19,068
<b>Kredit / Pembiayaan</b>	36,618	34,069	38,298	39,014	40,016
Konvensional	24,916	21,168	25,202	26,226	26,807
Syariah	11,702	12,902	13,096	12,789	13,209
<b>LDR / FDR</b>	89.68%	82.76%	86.90%	89.60%	85.76%
Konvensional	103.96%	93.13%	105.68%	101.01%	97.14%
Syariah	69.40%	69.98%	64.76%	72.75%	69.28%
<b>NPL / NPF</b>	18.45%	18.21%	19.12%	20.20%	38.76%
Konvensional	18.31%	18.91%	20.79%	22.46%	48.58%
Syariah	18.74%	17.07%	15.91%	15.56%	18.82%

Sementara itu, kualitas kredit yang disalurkan BPR/S semakin memburuk yang tercermin pada meningkatnya rasio NPL/NPF dari 20,20% di triwulan IV-2006 menjadi sebesar 38,76% pada triwulan I-2007. Hal ini disebabkan oleh penurunan kolektibilitas kredit dari lancar

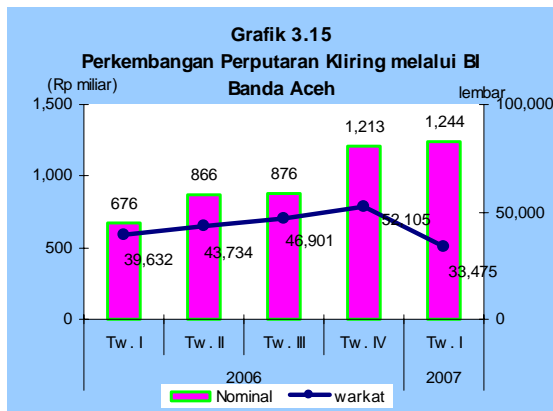
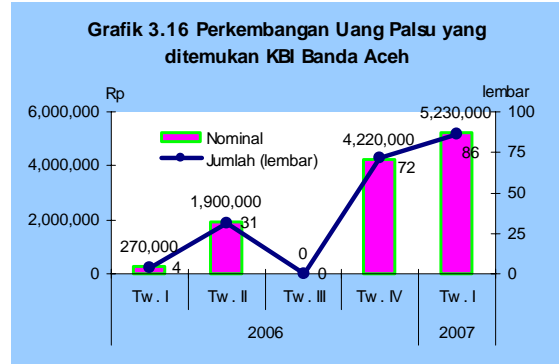
menjadi non-lancar. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi peningkatan kredit non-lancar.

**C. Sistem Pembayaran**

Kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal diperkirakan kembali menurun setelah sempat meningkat di triwulan IV-2006. Hal ini diindikasikan oleh penurunan outflow di Kantor Bank Indonesia Banda Aceh pada triwulan I-2007 dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.13). Outflow mengalami penurunan dari Rp1,55 triliun menjadi Rp522 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain : (1) Kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang tinggi untuk menyambut hari raya idul fitri dan tahun baru yang terjadi pada triwulan IV-2006, kembali turun. (2) Realisasi anggaran pemerintah daerah yang masih rendah mengingat APBD dati I dan II NAD 2007 belum disahkan pada triwulan I-2007 dan (3) Kebutuhan swasta akan uang kartal yang masih rendah sebagai akibat transaksi konsumsi masyarakat yang menurun dan pembelanjaan pemerintah yang belum direalisasikan.



Aktivitas transaksi pembayaran non-tunai melalui sistem kliring pada triwulan I-2007 mengalami peningkatan dari segi nominal namun dari volume transaksi mengalami penurunan. Dibandingkan nilai transaksi triwulan sebelumnya (Tw.IV-2006), terjadi peningkatan 2,56% menjadi Rp1,24 triliun. Sedangkan volume transaksi mengalami penurunan sebesar 35,75% menjadi 33.475 lembar warkat.



Sementara itu, jumlah uang palsu yang ditemukan KBI Banda Aceh pada triwulan I-2007 meningkat. Bila dibandingkan triwulan sebelumnya, nominal uang palsu mengalami peningkatan sebesar 23,93% (qtq) menjadi Rp5.230.000,-. Sedangkan jumlahnya juga meningkat dari 72 lembar menjadi 86 lembar dengan rincian 61 lembar pecahan Rp50.000,-, 21 lembar pecahan Rp100.000,- dan 4 lembar pecahan uang Rp20.000,-.

#### BOKS 4 : Kredit Bermasalah BPR NAD

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi BPR di NAD adalah rasio NPL yang tinggi yang tercermin salah satunya pada rata-rata NPL BPR selama tahun 2006 yang mencapai 19,16%. Menurut Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia Banda Aceh (TPB KBI Banda Aceh), tingginya kredit bermasalah pada BPR sebagian besar disebabkan oleh kekuranghati-hatian Bank dalam menyalurkan kredit selain imbas bencana tsunami yang mengakibatkan banyak debitur tidak mampu membayar. Analisa kredit yang dilakukan BPR hanya mempertimbangkan agunan yang diberikan debitur tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar debitur di masa depan terutama cashflow ( arus kas) debitur. Sehingga terkesan BPR menjadi "lembaga pegadaian", dimana pembayaran kredit digantikan dengan agunan yang diberikan debitur. Oleh karenanya, banyak debitur yang kesulitan membayar angsuran karena cash-flow yang dimiliki tidak mencukupi. Hal inilah yang menyebabkan rasio NPL BPR cukup tinggi.

Pada Desember 2006, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PPAP BPR yang didalamnya terdapat perubahan dalam penentuan kolektibilitas kredit BPR yang antara lain :

a. Penentuan kolektibilitas tidak lagi ditentukan menurut jumlah bulan tunggakan, melainkan pada jumlah berapa kali tunggakan angsuran pokok dan/atau angsuran bunga. Sehingga kredit yang angsurannya dengan periode lebih kecil dari bulanan (mingguan atau harian), perubahan kolektibilitas dapat terjadi pada jangka waktu yang lebih singkat. Contoh : Kredit dengan angsuran mingguan, telat diangsur selama 1 bulan, maka sebelumnya diberlakukan PBI baru tersebut, kolektibilitasnya tetap lancar (keterangan : kolektibilitas kredit saat itu berstatus Lancar), sedangkan berdasarkan PBI yang baru

tersebut, kolektibilitasnya sudah turun menjadi Kurang Lancar, karena sudah melalui tempo 3 minggu.<sup>1</sup>

b. Kredit yang telah jatuh tempo, walaupun hanya lewat 1 hari dapat digolongkan sebagai kredit non-lancar.

Implementasi ketentuan baru tersebut dalam pemeriksaan BPR di NAD oleh TPB KBI Banda Aceh membuat NPL BPR meningkat, sehingga dari NPL sebesar 20,20% pada posisi Desember 2006 melonjak drastis menjadi 38,76% pada posisi Maret 2007. Melihat perkembangan NPL yang kurang menggembirakan tersebut, TPB KBI Banda Aceh melakukan langkah-langkah pembinaan yang sudah menjadi tugas pokoknya. Dalam melakukan pembinaan, TPB KBI Banda Aceh menawarkan

---

<sup>1</sup> Perubahan kolektibilitas dari "Lancar" menjadi "Non Lancar" menurut jangka waktu kolektibilitas bila pembayaran angsuran kredit terlambat selama 3 bulan tanpa mempertimbangkan periode angsuran, sedangkan menurut PBI baru, jangka waktu perubahan didasarkan pada jumlah berapa kali tunggakan angsuran sehingga perubahan kolektibilitas dapat terjadi bila melampaui waktu 3 minggu (3 kali angsuran).

langkah-langkah yang dapat dilakukan BPR yang disesuaikan dengan masalah yang dihadapi masing-masing BPR dalam mengatasi kredit bermasalah yang antara lain sebagai berikut :

- a. Penagihan yang lebih intensif kepada debitur.
- b. Pengambilalihan kredit bermasalah oleh pemegang saham atau pihak lainnya.
- c. Reschedulling dan Restrukturisasi kredit
- d. Penghapusbukuan kredit yang sudah tidak dapat diselamatkan, dengan didahului pembentukan cadangan PPAP yang cukup.
- e. Penambahan setoran modal untuk mendongkrak ekspansi kredit (terutama untuk BPR yang terkena imbas tsunami sehingga banyak kredit yang menjadi bermasalah).

Langkah-langkah perbaikan NPL yang telah disebutkan tadi semuanya

(kecuali penagihan yang lebih intensif) membutuhkan penambahan modal sebagai syarat utama. Oleh karena itu, selain melakukan pembinaan kepada BPR di NAD, TPB KBI Banda Aceh juga mengambil tindakan konkret dengan mengusulkan dan memfasilitasi beberapa program yang antara lain :

- a. Program merger beberapa BPR milik pemerintah daerah untuk penguatan kelembagaan yang diikuti dengan rencana Pemerintah Daerah untuk menambah setoran modal.
- b. Program penguatan beberapa BPR oleh ADB (Asian Development Bank) dengan penyertaan modal melalui PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) dengan mekanisme pemberian *Grant*. Selain itu juga diikuti dengan bantuan dana untuk penguatan aspek IT (Information Technology).

## BOKS 5 : Round-Up Harga di Kabupaten Pidie

Pada tanggal 9 sampai dengan 11 Mei 2007, Kantor Bank Indonesia Banda Aceh melaksanakan kegiatan Kas Keliling di Sigli, Kabupaten Pidie dan daerah sekitarnya. Kas Keliling tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat dalam hal penukaran uang pecahan dan penggantian Uang Tidak Layak Edar. Kegiatan tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat, mengingat sudah lama Kas Keliling tidak dilaksanakan di daerah tersebut mengingat kondisi konflik pada waktu dulu selain rusaknya kendaraan Kas Keliling akibat Tsunami.

Hal menarik yang ditemui seksi Kas dan Pengedaran KBI Banda Aceh sebagai pelaksana Kas Keliling adalah kurang diminatinya pecahan Rp100,- dan Rp200,- oleh masyarakat setempat. Penukaran yang dilakukan masyarakat sebagian besar untuk pecahan Rp1.000,- dan Rp500,- serta sejumlah kecil untuk pecahan Rp10.000,- dan Rp5.000,-. Berdasarkan informasi dari masyarakat yang dilayani tersebut, uang pecahan Rp100,- dan Rp200,- kurang diminati karena uang pecahan tersebut tidak diterima lagi oleh masyarakat setempat dalam transaksi jual-beli. Hal ini disebabkan tidak adanya lagi barang yang dijual dengan harga yang menggunakan pecahan uang tersebut yang biasanya kita temui pada barang kebutuhan sehari-hari (*consumer-goods*) atau jajanan anak-anak yang biasanya dihargai dibawah Rp500,-. Konflik berkepanjangan selama ini tampaknya menjadi penyebab fenomena tersebut. Ketika konflik berlangsung, kegiatan kas keliling

tidak dapat dilaksanakan mengingat faktor keamanan. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan pecahan uang kecil khususnya pecahan Rp100,- dan Rp200,-. Karena ketiadaan uang pecahan kecil tersebut, lambat laun masyarakat meninggalkan pecahan tersebut dalam transaksi jual-beli sehari-hari.

Fenomena yang sama juga dijumpai oleh KBI Banda Aceh pada Bank-Bank yang beroperasi di Kabupaten tersebut. Saat ini, terdapat 4 Bank Umum yang beroperasi di Kabupaten Sigli, yaitu BNI, BRI, BPD Aceh dan BTPN. Bank-bank tersebut tidak melakukan kegiatan penukaran dan tidak menyiapkan uang pecahan kecil di khazanahnya. Selain tidak ada permintaan masyarakat terhadap uang pecahan Rp100,- dan Rp200,-, Bank beralasan biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman uang pecahan kecil tersebut tidak ekonomis. Karena biaya pengiriman didasarkan pada volume bukan nominal uang yang dikirim.

Dampak dari tidak digunakannya uang pecahan kecil seperti Rp100,- dan Rp200,- yang ditemui di Kabupaten Pidie tersebut menyebabkan pembulatan keatas (*round-up*) harga barang-barang (yang biasanya dibulatkan lebih tinggi dari harga semula). Sehingga tingkat harganya lebih tinggi ratusan rupiah dibandingkan harga wajarnya. Hal ini tentunya memberatkan masyarakat ekonomi bawah yang sensitif pada perubahan harga walaupun nilainya hanya ratusan rupiah saja. Pengaruh pembulatan harga terhadap daya beli masyarakat perlu diteliti lebih jauh, apabila

cukup signifikan maka pihak terkait perlu mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan uang pecahan kecil tersebut dalam transaksi jual-beli sehari-hari seiring usaha Bank Indonesia yang terus memberikan pelayanan kas kepada masyarakat khususnya penukaran uang pecahan.

(Sumber : Seksi Kas dan Pengedaran KBI Banda Aceh)

## BAB IV PROSPEK PEREKONOMIAN

### 1. PROSPEK

Perekonomian NAD untuk triwulan II-2007 diperkirakan tetap tumbuh positif. Hal ini didorong peningkatan realisasi anggaran untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi BRR NAD-Nias dibandingkan awal tahun, dan peningkatan *government spending* setelah APBD untuk NAD baik datu I dan datu II disahkan pada bulan Mei 2007 serta peningkatan produksi swasta diberbagai sektor. Selain itu konsumsi masyarakat juga diperkirakan terus meningkat seiring UMP (Upah Minimum Provinsi) NAD yang meningkat dari Rp820.000,- menjadi Rp850.000,- untuk tahun 2007. Sedangkan sumbangan ekspor-impor sendiri diperkirakan relatif tetap mengingat tidak adanya rencana peningkatan produksi migas baik pertambangan maupun industri pengolahan.

Sementara itu laju inflasi diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I-2007, karena harga-harga yang sempat melonjak akibat terputusnya jalur distribusi oleh banjir Tamiang kembali normal. Sedangkan dari sisi permintaan, tidak akan memberikan tekanan berarti karena tidak adanya perayaan keagamaan yang biasanya mendorong permintaan. Namun permintaan kelompok barang yang terkait pembelanjaan pemerintah serta rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan meningkat sehingga

berpotensi memberi tekanan inflasi, misalnya pada kelompok perumahan.

Sedangkan kinerja perbankan diperkirakan meningkat, terutama dalam hal penghimpunan DPK, karena jaringan Bank bertambah dengan rencana dibukanya Kantor Cabang Bank Panin di Banda Aceh pada Bulan Juni 2007 nanti, serta penambahan kantor bank baik kantor cabang pembantu maupun kantor kas. Sedangkan penyaluran kredit diperkirakan relatif tetap karena tidak adanya rencana ekspansi sektor riil secara signifikan. Sementara itu, BPR diperkirakan masih berkekuatan dalam perbaikan kredit bermasalah yang melonjak pada triwulan I-2007 (lihat Bab III). Sementara itu, pada sistem pembayaran diperkirakan terjadi peningkatan yang signifikan baik tunai maupun non-tunai, seiring realisasi APBD NAD tahun 2007 yang baru disahkan bulan Mei.

### 2. REKOMENDASI

Permasalahan utama yang dihadapi provinsi NAD saat ini adalah tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Salah satu jalan untuk mengatasi kedua hal tersebut adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari peningkatan produksi bukan konsumsi, disamping program-program jangka pendek. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, secara teori tergantung pada peningkatan variabel konsumsi, investasi, pengeluaran

pemerintah (*government spending*) dan ekspor-impor. Menurut struktur perekonomian NAD tahun 2006, yang berkontribusi besar pada perekonomian adalah komponen net-ekspor (dengan dominasi migas) sebesar 33,4%. Sedangkan urutan kedua adalah konsumsi rumah tangga sebesar 31,46%. Sedangkan *government spending* (baik konsumsi maupun investas) dan investasi masih rendah masing-masing sebesar 17,80% dan 13,78%. Bila dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, NAD tidak dapat bergantung pada komponen ekspor migas tersebut karena sifatnya yang padat modal bukan padat karya sehingga nilai tambah yang diperoleh tidak dapat dinikmati masyarakat secara merata selain penyerapan tenaga kerja yang rendah. Sedangkan bila hanya bersandar pada konsumsi rumah tangga yang tidak diimbangi produksi barang dan jasa dari daerah itu sendiri, dikhawatirkan hanya menimbulkan *bubble-economic* yang berakibat pada peningkatan inflasi yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Tentunya yang paling ideal saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada peningkatan investasi swasta khususnya pada sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja dan mempunyai nilai tambah yang tinggi, seperti sektor pertanian. Pertumbuhan model ini akan meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NAD yang selama ini banyak disupply dari provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dengan peningkatan produksi akan mendorong

penyerapan tenaga kerja yang diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Namun investasi swasta tidak akan masuk apabila NAD belum dianggap kondusif baik secara politik, keamanan maupun ketersediaan infrastruktur. Secara politik, NAD sudah cukup kondusif pasca kesuksesan Pilkadaung baik provinsi maupun kabupaten/kota yang pertama diselenggarakan serentak di Indonesia. Kondisi keamanan secara umum juga sudah baik, meskipun terdapat eskalasi kriminalitas yang mengkhawatirkan salah satu organisasi terbesar di Aceh. Sedangkan ketersediaan infrastruktur masih terkendala terutama ketersediaan energi listrik. Oleh karena itu, jaminan ketiga aspek tersebut menjadi perhatian para investor, sehingga saat ini masih bersikap *wait and see*. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan BRR menjadi sangat penting untuk menstimulus perekonomian NAD. Realisasi anggaran yang tinggi dan tepat waktu menjadi syarat utama agar stimulus *government spending* berhasil. Karena diharapkan dana tersebut dapat menimbulkan efek multiplier yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat NAD dengan syarat dana tersebut diserap oleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Selain itu, realisasi yang tepat waktu dapat menghindarkan terjadinya inflasi akibat permintaan yang meningkat drastis dalam satu waktu. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Penyediaan infrastruktur khususnya energi listrik dalam waktu secepatnya, agar komitmen investasi swasta segera dapat direalisasikan, tidak hanya sebatas MOU (Nota Kesepahaman) semata. Karena dikhawatirkan investor tidak sabar untuk mengalihkan dananya pada investasi lain di luar Aceh yang lebih menjanjikan dalam waktu dekat.
- Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran difokuskan pada pengembangan sektor-sektor yang sifatnya padat karya dan berkontribusi besar pada PDRB NAD, seperti sektor pertanian, industri pengolahan non-migas dan semacamnya.
- Mendorong pendirian sentra-sentra produksi khususnya produksi bahan makanan seperti kilang penggilingan beras yang representatif dan industri es untuk pengawetan ikan untuk menekan tingkat harga khususnya kelompok bahan makan yang merupakan kontributor terbesar pada inflasi NAD. Tingginya inflasi dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga pada gilirannya dapat mendorong tingkat kemiskinan.

Sementara itu, kontribusi perbankan sebagai lembaga intermediasi sangatlah penting. Kondisi paradoks dimana Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, lahan menganggur yang luas, dana masuk yang tinggi namun tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tinggi, menunjukkan perlunya intermediasi agar dana yang masuk ke Aceh dapat

terserap untuk pengolahan sumberdaya alam dan lahan menganggur oleh masyarakat miskin dan pengangguran. Permasalahan yang saat ini dihadapi perbankan adalah aksesibilitas jaringan bank yang belum merata dan masuk sampai ke pelosok daerah dan usaha mikro (notabene dimiliki masyarakat miskin) yang belum *bankable*. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi hal tersebut yang antara lain :

1. Penambahan jaringan bank, khususnya BPR/S yang sesuai untuk menjangkau daerah terpencil dan usaha mikro, kecil yang ada didaerah. Sampai saat ini jumlah BPR/S yang ada di NAD baru 20 bank. Sehingga potensi pasar yang belum tergarap masih besar. Oleh karena itu, diharapkan investor baru untuk ambil bagian dalam pembiayaan BPR/S di daerah. Selain itu juga, Bank Umum dapat menyalurkan likuiditas yang melimpah melalui linkage program pada BPR/S tersebut.
2. Pengembangan skim kredit baru untuk menggarap usaha-usaha yang belum tergarap seperti pemodalan untuk petani dan nelayan yang biasanya terkendala masalah agunan. Hal ini dapat diatasi salah satunya dengan adanya LPKD (Lembaga Penjaminan Kredit Daerah) dan sistem kredit secara berkelompok (model Grameen Bank).
3. Program sertifikasi tanah agar tanah yang dimiliki masyarakat dapat dijadikan agunan yang

saat ini menyebabkan banyak usaha mikro yang layak dibiayai namun tidak bankable.

Secara umum permasalahan dalam intermediasi dapat diatasi dengan kesungguhan oleh berbagai pihak terkait seperti pemerintah dan perbankan untuk mengeksekusi program-program yang direncanakan.

Halaman ini sengaja dikosongkan.  
*This page is intentionally blank*